



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.609/BKKPN/TU.140/IV/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Dokumen
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja BKKPN Kupang
Triwulan I Tahun 2025

17 April 2025

Yth. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
di Jakarta

Dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini Kami sampaikan Laporan Kinerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025, pada tautan berikut <https://tinyurl.com/LKJ2025TWI>.

Adapun capaian nilai kinerja organisasi (NKO) BKKPN Kupang pada periode triwulan I tahun 2025 berdasarkan aplikasi pengelolaan kinerja KKP (kinerjaku.kkp.go.id) adalah sebesar 109,47 (Baik), penjelasan terkait dengan capaian tiap indikator kinerja tertuang dalam laporan kinerja dan kiranya dapat dilakukan reviu sebagai bahan perbaikan untuk peningkatan kualitas kinerja serta bahan penilaian dalam pencapaian sasaran kinerja.

Demikian Kami sampaikan, atas perkenan dan arahan lebih lanjut Bapak Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi

Tembusan :

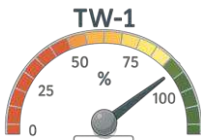
1. Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Seluruh Pegawai BKKPN Kupang

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BKKPN Kupang

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025. Pada pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/sakipdjprl2025.

CAPAIAN KINERJA



109,47
(Baik)

Nilai Kinerja Organisasi



Penyusunan Laporan SPIP

Target: 1 Dokumen **100%**
 Realisasi: 1 Dokumen



Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan

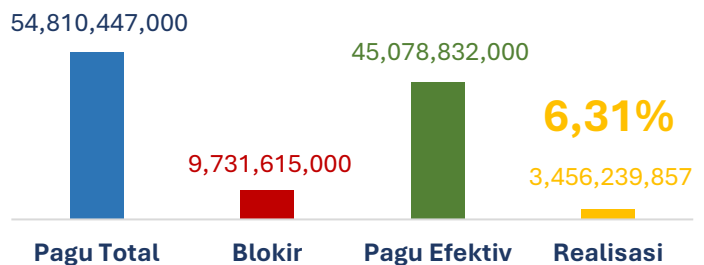
Target: 95% **105,26%**
 Realisasi: 100%



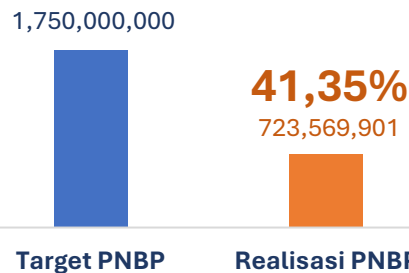
Pengumuman RUP pada SIRUP

Target: 76% **120%**
 Realisasi: 100%

REALISASI BELANJA



REALISASI PENDAPATAN



PELAYANAN PERIZINAN



■ Karcis Masuk ■ Tanda Masuk



TANTANGAN

- Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 belum dapat dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh:
 - Adanya blokir alokasi anggaran atas pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
 - Adanya penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*; dan
 - Pengembangan struktur kelembagaan unit kerja Eselon I sebagai unit kerja atasan.
- Hasil pemantauan pembangunan zona integritas BKKPN Kupang oleh tim penilai internal belum optimal.

REKOMENDASI

- Perlu melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja sesuai struktur kelembagaan yang baru;
- Perlu melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2025 lingkup BKKPN Kupang.



PENGHARGAAN



- UPT dengan PNPB Tertinggi Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
- Nilai Kinerja Organisasi Istimewa (113,98) Triwulan IV Tahun 2024;
- UPT Terbaik 1 Implementasi SAKIP Tahun 2024 Lingkup DJPKRL; dan
- Unit Organisasi Informatif Tahun 2024 Lingkup DJPKRL.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



LAPORAN

KINERJA

BKKPN KUPANG

Triwulan I Tahun 2025



BKKPN
KUPANG

Jalan Yos Sudarso Jurusan Bo'lok

Ke1. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang, NTT. Telp. (0380) 890421

KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BIJAK
MENGELOLA LAUT

#bangga
melayani bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LEBE BAE
Layanan Prima, Empati, Berani Jujur, Efektif dan
Efisien, Bersih dari KKN, Akuntabel, Eksis



TIM PENYUSUN

Pengarah:

Imam Fauzi (Kepala BKKPN Kupang)

Ketua / Manajer Tim:

Muhammad Ramli Firman (Kepala Subbagian Umum)

Anggota:

1. Tri Setiyo Wisnu Wardoyo (Perencana Ahli Pertama)
2. Riyan Afif Al Ihsan (APJK Ahli Pertama)

Kontributor:

Tim Tata Kelola Kinerja

Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas BKKPN Kupang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memberikan gambaran dan informasi terkait upaya dan langkah-langkah strategis BKKPN Kupang pada periode Triwulan I Tahun 2025 dalam rangka meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumberdaya, hambatan dan permasalahan yang terjadi serta rencana tindak lanjutnya.

Harapan kami, laporan ini menjadi bahan informasi penyelenggaraan program dan kegiatan BKKPN Kupang dan sekaligus sebagai bahan evaluasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) selaku Unit Kerja atasan.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam pencapaian ini, dan berharap menjadi salah satu pertimbangan oleh semua pihak untuk upaya perbaikan dan pengembangan kawasan konservasi nasional di wilayah kerja BKKPN Kupang. Kami juga menyadari masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, karenanya kami mohon masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.



Kupang, 17 April 2025


Imam Fauzi
Kepala BKKPN Kupang

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap unit kerja di kementerian atas penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Laporan kinerja disusun periodik baik triwulanan (LKj Interim) dan/atau tahunan (LKj Tahunan). Penyusunan laporan kinerja meliputi pengukuran kinerja, evaluasi, serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil capaian target kinerja. Pelaporan kinerja dilaksanakan dengan tujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Tahun 2025 BKKPN Kupang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan evaluasi dari pelaksanaan kegiatan dalam jangka waktu 3 bulan dari bulan Januari hingga Maret 2025. Pada pelaporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 data capaian dan target kinerja BKKPN Kupang telah disampaikan secara lengkap dan disertai dokumen data dukung yang tersimpan di dalam folder bit.ly/SAKIPDjPRL2025.

Capaian Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada Triwulan I Tahun 2025 ini yaitu **(1)** Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang 1 dokumen (Target 1 dokumen), **(2)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang 100% (target 95%), **(3)** Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang 100% (target 76%).

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp54.810.447.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*, namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden



Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.731.615.000 sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp45.078.832.000 dengan **realisasi anggaran** sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.456.239.857** atau **6,31%** dari pagu anggaran.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp723.569.901 atau tercapai 41,35% dari target.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 BKKPN Kupang telah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

1. UPT dengan PNBP Tertinggi Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
2. Nilai Kinerja Organisasi Istimewa (113,98) Triwulan IV Tahun 2024;
3. UPT Terbaik 1 Implementasi SAKIP Tahun 2024 Lingkup DJPKRL; dan
4. Unit Organisasi Informatif Tahun 2024 Lingkup KKP.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian dengan realisasi indikator kinerja pada masing-masing sasaran kegiatan. Capaian kinerja organisasi BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025 sesuai dengan aplikasi pengelolaan kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) adalah **109,47 (Baik)**.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan BKKPN Kupang pada periode Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 belum dapat dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh:

- Adanya blokir alokasi anggaran atas pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
- Adanya penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*; dan
- Pengembangan struktur kelembagaan unit kerja Eselon I sebagai unit kerja atasan.

2. Hasil pemantauan pembangunan zona integritas BKKPN Kupang oleh tim penilai internal belum optimal.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

1. Perlu melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja sesuai struktur kelembagaan yang baru;
2. Perlu melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2025 lingkup BKKPN Kupang;

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	2
1.4. Tugas dan Fungsi	2
1.5. Sistematika Penulisan	8
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis 2025-2029	10
2.2. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	17
3.1.1. IKU 1 Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang	17
3.2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	23
3.2.1. IKU 2 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	23

3.3.	Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	33
3.3.1.	IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang ..	33
3.4.	Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	36
3.4.1.	IKU 4 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	36
3.5.	Sasaran Kegiatan 6 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	39
3.5.1.	IKM 5 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang	39
3.5.2.	IKM 6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang	45
3.5.3.	IKM 7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang	48
3.5.4.	IKM 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang .	51
3.5.5.	IKM 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang	54
3.5.6.	IKM 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang	57
3.5.7.	IKM 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang	60
3.5.8.	IKM 12 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang	62
3.5.9.	IKM 13 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang	65
3.5.10.	IKM 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	69



3.5.11. IKM 15 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang ..	72
3.6. Akuntabilitas Keuangan	75
3.7. Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan	79
BAB IV PENUTUP	80
4.1 Kesimpulan	80
4.2 Rekomendasi	82
4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	82
LAMPIRAN	84

DAFTAR TABEL

TABEL 1	Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025	13
TABEL 2	Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Tahun 2025	16
TABEL 3	Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi	18
TABEL 4	Capaian Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	19
TABEL 5	Kontribusi Wilayah Kerja dalam Penerbitan Izin dan PNPB	22
TABEL 6	Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	31
TABEL 7	Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	34
TABEL 8	Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	37
TABEL 9	Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP	40
TABEL 10	Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	41
TABEL 11	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai ...	45
TABEL 12	Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	46
TABEL 13	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	49
TABEL 14	Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	51

TABEL 15	Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	55
TABEL 16	Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	57
TABEL 17	Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	60
TABEL 18	Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	62
TABEL 19	Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	67
TABEL 20	Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	70
TABEL 21	Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	73
TABEL 22	Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	75
TABEL 23	Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	78
TABEL 24	Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya	82

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1	Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang	6
GAMBAR 2	Struktur Organisasi BKKPN Kupang	7
GAMBAR 3	Mekanisme Kerja BKKPN Kupang	7
GAMBAR 4	Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang	8
GAMBAR 5	Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	10
GAMBAR 6	Visi dan Misi Presiden	11
GAMBAR 7	17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat	12
GAMBAR 8	Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	15
GAMBAR 9	Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi	18
GAMBAR 10	Aplikasi Seapark	21
GAMBAR 11	Sosialisasi Kemitraan	32
GAMBAR 12	Verifikasi Pelaporan Online	43
GAMBAR 13	Penyusunan Laporan Kinerja	43
GAMBAR 14	Finalisasi Dokumen Perencanaan	43
GAMBAR 15	Reviu Laporan Kinerja	44
GAMBAR 16	Dialog Kinerja tahun 2025	44
GAMBAR 17	Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala	44
GAMBAR 18	Rekonsiliasi SAKTI	61
GAMBAR 19	Sharing Session PZI Poltek KP Kupang	64
GAMBAR 20	Pemantauan PZI Oleh TPI	64
GAMBAR 21	Internalisasi Pembangunan ZI	64
GAMBAR 22	Pengumuman PBJ pada SIRUP	71
GAMBAR 23	Presentasi Uji Publik Money KIP	74

GAMBAR 24	Realisasi Belanja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025	76
GAMBAR 25	Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025	77
GAMBAR 26	Penghargaan Triwulan I Tahun 2025	79

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1	Perjanjian Kinerja
LAMPIRAN 2	Capaian Laporan SPIP
LAMPIRAN 3	Capaian Rekomendasi Pengawasan
LAMPIRAN 4	Capaian Persentase RUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah untuk pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP ini meliputi: (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan data kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; serta (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Dalam hal ini, Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang juga menerapkan SAKIP, dalam pelaksanaan program dan kegiatannya mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja merupakan salah satu upaya dalam implementasi SAKIP dan sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program / kegiatan.

1.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 adalah untuk menyampaikan perkembangan dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang pada periode Triwulan I Tahun 2025.



1.3. Isu Strategis

Pada saat ini BKKPN Kupang memiliki berbagai isu strategis yang menjadi tantangan dan perlu dijawab melalui program dan kegiatan. Tantangan tersebut diantaranya:

- 1) Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum seluruhnya dikelola secara berkelanjutan;
- 2) Peran aktif masyarakat di kawasan konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum optimal dalam mendukung pengelolaan;
- 3) Pengendalian dan pemanfaatan ruang laut di kawasan konservasi Wilayah kerja BKKPN Kupang belum terkelola dan terdata dengan baik;
- 4) Pemanfaatan pulau-pulau kecil di kawasan konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang belum terkelola; dan
- 5) Peningkatan Reformasi Birokrasi.

1.4. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang sebagai Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan di kawasan konservasi perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas BKKPN Kupang menyelenggarakan fungsi: (1) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan; (2) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan ekosistem, habitat sumberdaya ikan, dan/atau situs budaya tradisional; (3) Pelaksanaan jejaring dan kemitraan dibidang konservasi sumber daya ikan; (4) Pengelolaan sistem, data, dan informasi; serta. (5) Pelaksanaan urusan

ketatausahaan. Dengan tugas pokok dan fungsi BKKPN tersebut, maka diharapkan pengelolaan kawasan konservasi perairan nasional dapat dilaksanakan dengan terencana serta melibatkan semua *stakeholder*, sehingga terwujud pengelolaan berbasis masyarakat yang berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, BKKPN Kupang Mengelola 8 Kawasan Konservasi Perairan Nasional, sebagaimana berikut:

1) Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu



TNP Laut Sawu ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5/KEPMEN-KP/2014 tentang Kawasan Konservasi Perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. TNP Laut Sawu memiliki luas 3.355.352,82 Ha yang terdiri dari wilayah perairan Selat Sumba dan sekitarnya seluas 557.837,40 Ha dan wilayah perairan Pulau Timor-Rote-Sabu-Batek dan sekitarnya seluas 2.797.512,42 Ha;

2) Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan



Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang dan Laut Sekitarnya memiliki luas 49.923,55 Ha;

3) Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat



Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan memiliki luas 2.268,59 Ha;

4) Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku



Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Laut Banda dan Sekitarnya di Provinsi Maluku. Taman di Perairan Laut Banda dan Sekitarnya memiliki luas 2.371,85 Ha;

5) Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua



Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua. Taman di Perairan Kepulauan Padaido dan Laut Sekitarnya memiliki luas 177.411,35 Ha;

6) Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat



Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya di Provinsi Papua Barat. Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya memiliki luas 325.084,92 Ha yang terdiri dari :

- Taman di Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat dan Laut Sekitarnya seluas 267.209,16 Ha; dan
- Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat dan Laut Sekitarnya seluas 57.875,75 Ha

7) Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara



SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.63/MEN/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya di Provinsi Maluku. SAP Kepulauan Aru Bagian Tenggara memiliki luas 114.000 Ha.

Kawasan konservasi perairan nasional yang merupakan wilayah kerja BKKPN Kupang sebagaimana disebutkan diatas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/Lembaga (K/L) (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN Nasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 65/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Ruang Laut, struktur organisasi BKKPN Kupang dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:



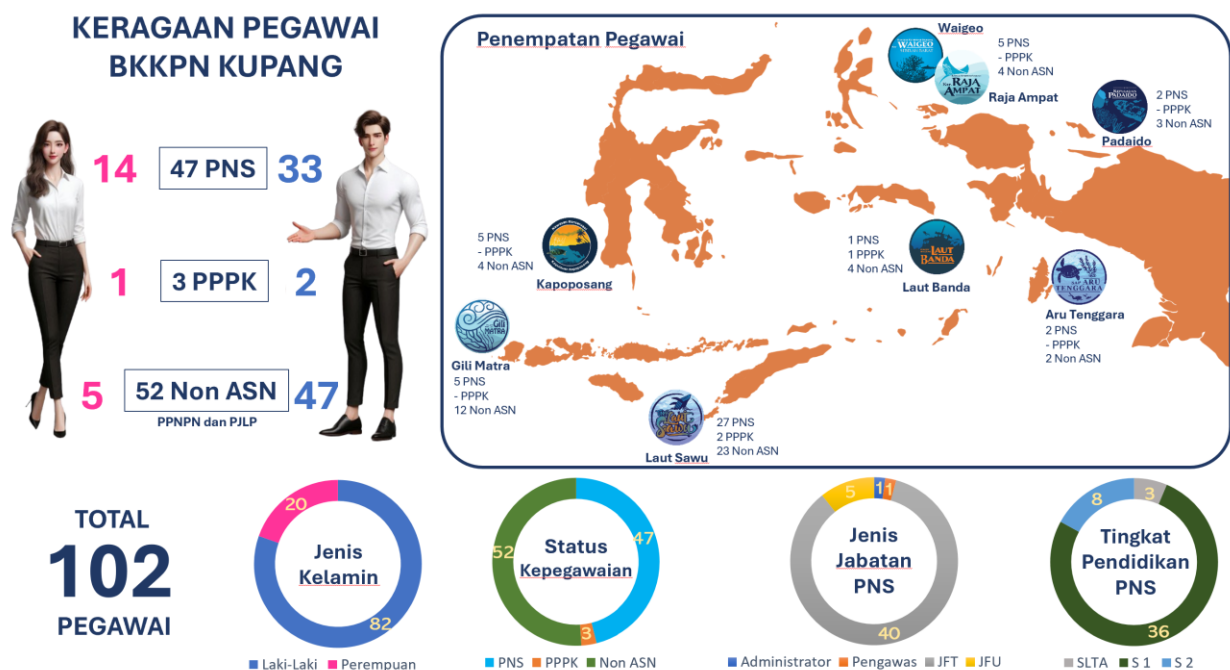
Gambar 2. Struktur Organisasi BKKPN Kupang

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, BKKPN Kupang telah melaksanakan pola kerja dan mekanisme kerja yang lincah, kolaboratif dan dinamis dalam upaya peningkatan kinerja, mekanisme kerja BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. Mekanisme Kerja BKKPN Kupang

Pada Tahun 2025 Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang memiliki 47 orang PNS, dimana Jumlah tersebut tersebar diseluruh wilayah kerja BKKPN Kupang (TNP Laut Sawu, Taman di Perairan Kepulauan Kapoposang, Taman di Perairan Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan, Taman di Perairan Laut Banda, Taman di Perairan Kepulauan Padaido, Taman di Perairan Waigeo Sebelah Barat dan Taman di Perairan Kepulauan Raja Ampat, SAP Kepulauan Aru bagian Tenggara dan Kantor di Kupang). Serta memiliki 3 Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 52 Orang tenaga non ASN (PPNPN dan PJLP). Secara garis besar keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 4. Keragaan SDM Aparatur BKKPN Kupang

1.5. Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 BKKPN Kupang adalah:

a. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*), tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan;

b. BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis serta indikator dan target indikator kinerja BKKPN Kupang tahun 2025.

c. BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran kegiatan tersebut dilakukan analisa capaian kinerja.

d. BAB IV Penutup

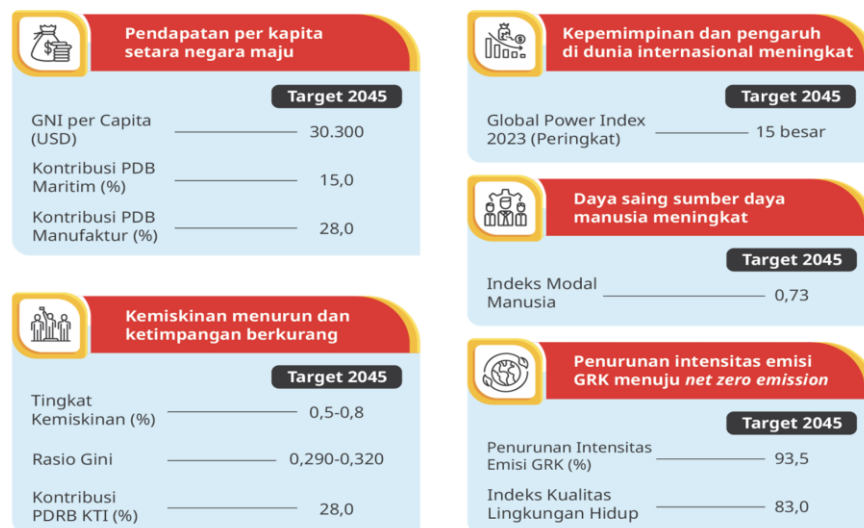
Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Indonesia memiliki cita-cita besar menjadikan Indonesia Emas 2045 dengan 5 sasaran utama visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5. Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi tersebut diwujudkan dalam 8 misi yang dikenal dengan Delapan Asta Cita yaitu:

1. memperkuat ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



Gambar 6. Visi dan Misi Presiden

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup Pembangunan diberbagai sektor serta Langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat. Keseluruhan Upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program Pembangunan nasional.

Program Prioritas	Program Hasil Terbaik Cepat
1 Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air	1 Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil
2 Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara	2 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten
3 Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi	3 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional
4 Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
5 Pemberantasan Kemiskinan	5 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut
6 Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba	6 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7 Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan Penyediaan Obat untuk Rakyat	7 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
8 Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi	8 Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%
9 Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif	
10 Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas	
11 Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	
12 Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani	
13 Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/ Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan	
14 Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan Umkm melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta Kota-Kota Inovatif- Karakteristik-Mandiri Lainnya	
15 Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis Sumber Daya Alam (SDA), termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas- Luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi	
16 Memastikan Kerukunan Antarumat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah	
17 Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga	

Gambar 7. 17 Program Prioritas Presiden dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

RPJMN Merupakan dasar bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Renstra K/L, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), hingga saat ini Renstra KKP Tahun 2025-2029 termasuk unit organisasi dibawahnya masih dalam proses penyusunan.

2.2. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2025

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 BKKPN Kupang, terdapat 5 sasaran kegiatan dan 17 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan, perjanjian kinerja tahun 2025 BKKPN Kupang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. Indikator dan Target Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%)	88
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5

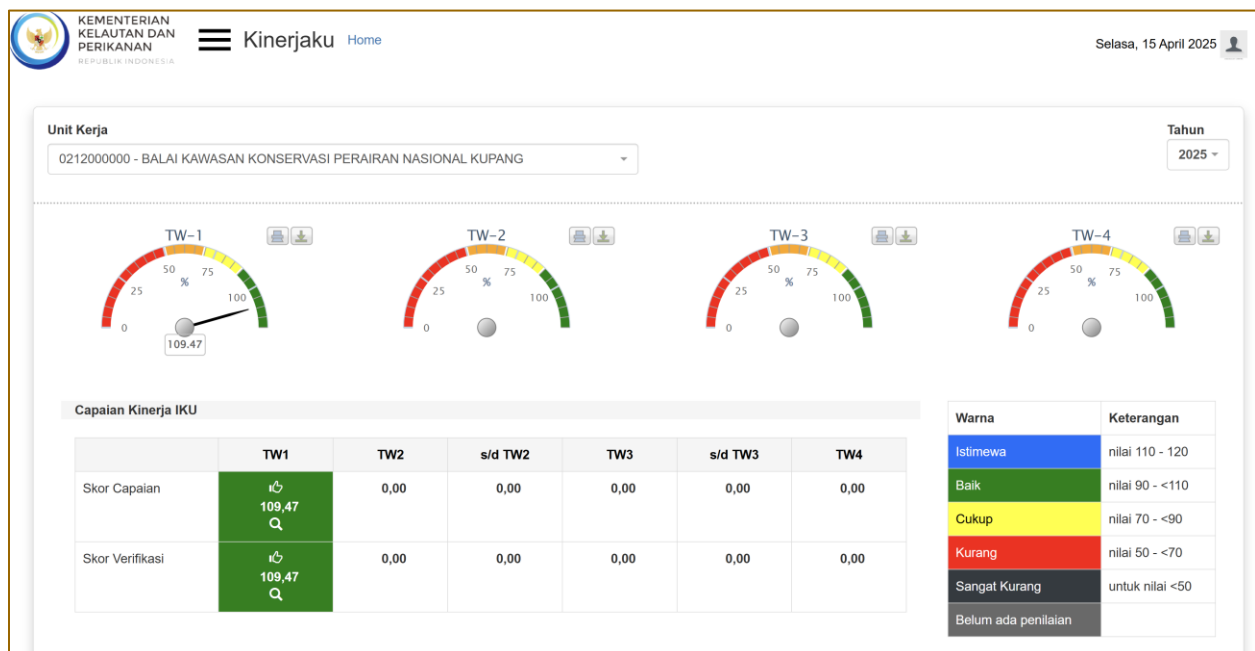
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	87
		10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95
		11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	80
		14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76
		15. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91

Dalam rangka mencapai indikator dan target kinerja BKKPN Kupang tahun 2025, alokasi anggaran BKKPN Kupang sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp54.810.447.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN) untuk pelaksanaan *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*. namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebesar Rp9.731.615.000 sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja adalah sebesar Rp45.078.832.000.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Manajerial (IKM), dengan total 15 (lima belas) indikator kinerja. Pada periode Triwulan I Tahun 2025 ini, sesuai dengan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi BKKPN Kupang adalah sebesar **109,47 (Baik)**. Capaian Kinerja Organisasi disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 8. Capaian Kinerja Organisasi BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

Indikator Kinerja		Frekuensi	Target Tahunan	Triwulan I Tahun 2025		
No	Uraian			Target	Realisasi	% (Kinerjaku)
IKU 1	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	Tahunan	85,05	-	-	-
IKU 2	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	Semester	2	-	-	-
IKU 3	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	2	-	-	-
IKU 4	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	Tahunan	1	-	-	-
IKM 5	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	88	-	-	-
IKM 6	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Semester	92	-	-	-
IKM 7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	71,5	-	-	-
IKM 8	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	Triwulan	4	1	1	100
IKM 9	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	Semester	87	-	-	-
IKM 10	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	Triwulan	95	95	100	105,26
IKM 11	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	Tahunan	100	-	-	-
IKM 12	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	85	-	-	-
IKM 13	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	80	-	-	-
IKM 14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (%)	Triwulan	76	76	100	120
IKM 15	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai)	Tahunan	91	-	-	-

3.1 Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

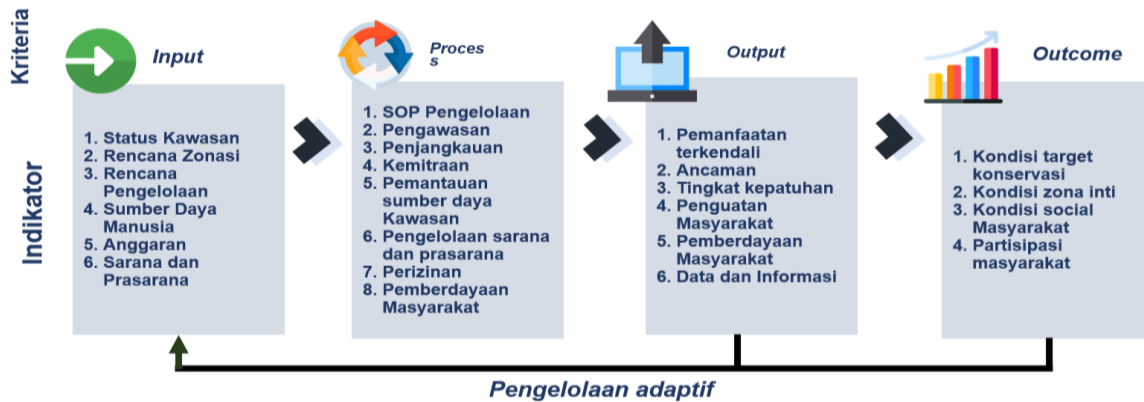
3.1.1 IKU 1 Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kawasan konservasi yang dikelola secara berkelanjutan merupakan kawasan konservasi yang dilakukan upaya operasionalisasi dan pemanfaatan kawasan konservasi, yang pengukurannya menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEPDJPRL/2020.

Kawasan Konservasi Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang dilakukan evaluasi efektivitas pengelolaannya seluas 4.026.543,20 Hektar yang terdiri dari 8 kawasan, yaitu:

- a. Taman Nasional Perairan (TNP) Laut Sawu seluas 3.355.352,82 Hektar;
- b. Kawasan Konservasi Kepulauan Kapoposang seluas 49.923,55 Hektar;
- c. Kawasan Konservasi Pulau Gili Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan seluas 2.268,59 Hektar;
- d. Kawasan Konservasi Kepulauan Padaido seluas 177.411,35 Hektar;
- e. Kawasan Konservasi Laut Banda Seluas 2.501,98 Hektar;
- f. Kawasan Konservasi Kepulauan Raja Ampat seluas 57.875,75 Hektar;
- g. Kawasan Konservasi Kepulauan Waigeo Sebelah Barat seluas 267.209,16 Hektar; dan
- h. Suaka Alam Perairan (SAP) Kepulauan Aru Bagian Tenggara seluas 114.000 Hektar.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada **kriteria input, proses, output dan outcome** sebagaimana disajikan pada gambar berikut:



Gambar 9. Kerangka Pikir Penilaian Efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai evaluasi menunjukkan status efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dalam mencapai tujuan pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Status Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Nilai Akhir Evaluasi	Warna	Status	Keterangan
< 50 %	Perunggu	Dikelola Minimum	Desain dan rancangan kawasan sudah dilakukan dan proses pengelolaan sudah dilaksanakan namun masih diperlukan upaya untuk mencapai tujuan pengelolaan.
> 50-85%	Perak	Dikelola Optimum	Fungsi-fungsi pengelolaan sudah berjalan secara adatif dan beberapa tujuan pengelolaan sudah tercapai.
>85%	Emas	Dikelola Berkelanjutan	Manfaat pengelolaan dirasakan oleh masyarakat dengan nilai-nilai konservasi yang terlindungi dan lestari.

Cara menghitung indikator kinerja utama ini adalah dengan menghitung rata-rata hasil penilaian efektivitas kawasan konservasi perairan nasional wilayah kerja BKKPN Kupang dengan menggunakan Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPRL/2020.

Target indikator kinerja utama Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebesar 85,05%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 1. Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 1. Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerja)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerja)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	-	-	-	-	-	85,05	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian kinerja.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja pada periode triwulanan, dan terdapat perbedaan formula perhitungan capaian kinerja dimana pada periode tahun sebelumnya yang dihitung adalah selisih peningkatan, sedangkan pada tahun ini yang dihitung adalah nilai peningkatannya, selanjutnya nama indikator kinerja pun telah mengalami penyesuaian yang semula adalah Persentase Peningkatan Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjadi Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

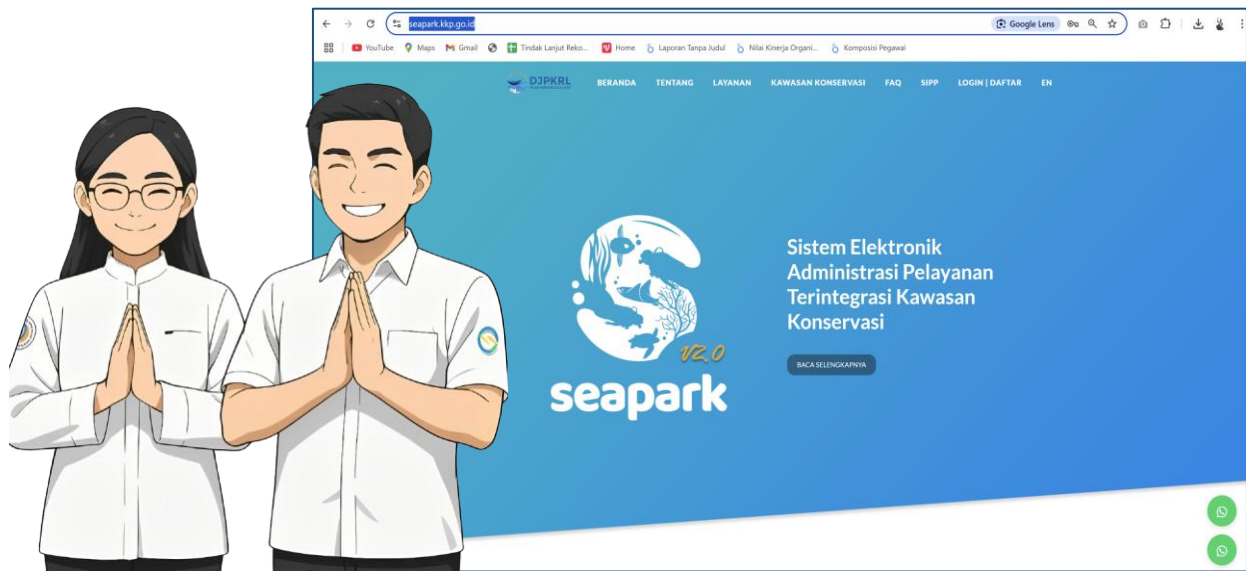
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah seluruh alokasi anggaran kegiatan pendukung belum dapat digunakan, yang diakibatkan oleh adanya blokir anggaran dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan adanya penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA* sesuai surat Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pendukung capaian yang dapat dilakukan secara daring/*online* sambil menunggu arahan lebih lanjut dari unit organisasi eselon I.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja adalah pelaksanaan pelayanan penerbitan izin pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah kerja BKKPN Kupang periode Januari - Maret 2025 yang dilakukan secara *online* melalui aplikasi seapark yang dapat diakses melalui tautan <https://seapark.kkp.go.id/>.



Gambar 10. Aplikasi Seapark

Pelayanan perizinan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang telah diterbitkan berupa tanda masuk kegiatan penelitian dan karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan di wilayah kerja BKKPN Kupang. Adapun jumlah izin yang diterbitkan sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 5.815 izin, yang terdiri dari 18 tanda masuk pendidikan dan 5.797 karcis masuk kegiatan pariwisata alam perairan, serta telah berkontribusi dalam penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp714.070.000, Adapun jumlah penerbitan izin dan penerimaan negara bukan pajak, serta kontribusi masing-masing wilayah kerja BKKPN Kupang disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 5. Kontribusi Wilayah Kerja dalam Penerbitan Izin dan PNBP

No	Kawasan	Karcis Masuk Pariwisata		Tanda Masuk Penelitian		Tanda Masuk Pendidikan		Jumlah	
		Alam Perairan							
		Izin	PNBP (Rp)	Izin	PNBP (Rp)	Izin	PNBP (Rp)	Izin	PNBP (Rp)
1	Gili Matra	4.543	446.820.000	8	900.000	-	-	4.551	447.720.000
2	Waigeo	1.063	238.470.000	-	-	-	-	1.063	238.470.000
3	Laut Sawu	81	11.560.000	9	900.000	-	-	90	12.460.000
4	Raja Ampat	55	13.650.000	-	-	-	-	55	13.650.000
5	Kapoposang	39	885.000	1	100.000	-	-	40	985.000
6	Laut Banda	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Padaido	16	785.000	-	-	-	-	16	785.000
8	Aru Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		5.797	712.170.000	18	1,900.000	-	-	5.815	714.070.000

3.2 Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.2.1 IKU 2 Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Kerjasama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Unit Kerja dengan satu atau lebih Lembaga/Badan/Organisasi, untuk mendukung kinerja Unit Kerja. Kerjasama dapat dilakukan dengan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha/Industri/Perusahaan, dan Organisasi Kemasyarakatan.

Kemitraan adalah hubungan kerja sama antara dua pihak atau lebih, berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan dalam mendukung konservasi dan keanekaragaman hayati laut. Kemitraan dapat dilakukan dengan masyarakat meliputi: kelompok masyarakat, Masyarakat Hukum Adat, LSM, Koorporasi, Lembaga Penelitian dan/atau Perguruan Tinggi.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen draft naskah Kemitraan Konservasi yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang untuk mendukung efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan disampaikan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Target indikator kinerja utama Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah

sebanyak 2 kesepakatan. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 2. Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 2. Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	2	-	-	-	-	2	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target semesteran, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Terdapat perbedaan periode pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan tahun 2025, dimana tahun 2024 dilakukan secara tahunan dan tahun 2025 dilakukan secara semesteran, oleh karena itu tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja pada periode triwulan.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

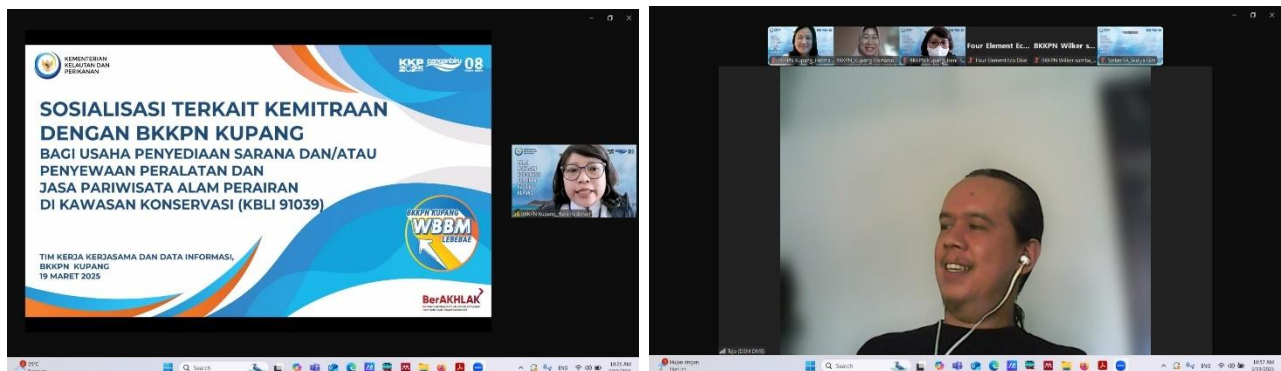
4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah seluruh alokasi anggaran kegiatan pendukung belum dapat digunakan, yang diakibatkan oleh adanya blokir anggaran dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan adanya penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA* sesuai surat Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melaksanakan kegiatan pendukung capaian yang dapat dilakukan secara daring/*online* sambil menunggu arahan lebih lanjut dari unit organisasi eselon I.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Kegiatan pendukung yang telah dilakukan guna pencapaian target indikator kinerja adalah telah dilakukan Sosialisasi Kemitraan Pengelolaan Kawasan Konservasi kepada Dive Operator pemegang izin SIUPKK (Surat Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi) tanggal 19 Maret 2025 secara daring melalui aplikasi zoom.



Gambar 11. Sosialisasi Kemitraan

3.3 Sasaran Kegiatan 3 Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.3.1 IKU 3 Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Disusun adalah dokumen yang dihasilkan dari upaya pengendalian pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dilakukan melalui Verifikasi Pemanfaatan Ruang Laut (Penilaian/Verifikasi dan Sosialisasi) dan Monitoring Pemanfaatan Ruang Laut.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen operasionalisasi perizinan pemanfaatan ruang laut yang terdiri dokumen verifikasi pemanfaatan ruang laut dan monitoring pemanfaatan ruang laut di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target indikator kinerja utama Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah sebanyak 2 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7. Capaian Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 3. Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 3. Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerja)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerja)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	3	-	-	-	-	2	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 dan tahun 2025 dilakukan secara tahunan, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah seluruh alokasi anggaran kegiatan pendukung tidak dapat digunakan, yang diakibatkan oleh adanya blokir anggaran dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan terdapat adanya perubahan kelembagaan unit organisasi Eselon I, dimana Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kini bertransformasi menjadi dua unit baru yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sesuai dengan Permen KP RI No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melakukan penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Hingga berakhirnya periode triwulan I tahun 2025 tidak terdapat adanya kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

3.4 Sasaran Kegiatan 4 Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja utama, yaitu Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang.

3.4.1 IKU 4 Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang

Dokumen Identifikasi Perizinan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil merupakan dokumen pengumpulan data pulau-pulau kecil yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha di seluruh wilayah Indonesia yang mencakup 3 (tiga) hal sebagai berikut:

- Jumlah Pulau-pulau Kecil yang telah dimanfaatkan di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia;
- Data perizinan pelaku usaha yang memanfaatkan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia; dan
- Data tumpang tindih kewenangan dalam pemberian perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil di setiap Kabupaten/Kota dan Provinsi di Indonesia.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja utama ini adalah dengan Menginventarisasi dan menjumlahkan dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Target indikator kinerja utama Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang yang ditetapkan

pada tahun 2025 adalah sebanyak 1 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 8. Capaian Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 4. Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang								
IKU 4. Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	-	-	-	-	-	1	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga pada periode saat ini dan periode selanjutnya tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah seluruh alokasi anggaran kegiatan pendukung tidak dapat digunakan, yang diakibatkan oleh adanya blokir anggaran dari kebijakan efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melakukan penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Hingga berakhirnya periode triwulan I tahun 2025 tidak terdapat adanya kegiatan pendukung capaian indikator kinerja yang telah dilaksanakan.

3.5 Sasaran Kegiatan 5 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang menjabarkannya dalam 11 (sebelas) indikator kinerja, yaitu Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (%), Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen), Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks), Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%), Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%), Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai), Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai), Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (Persen), dan Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai).

3.5.1 IKM 5 Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang

Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%).

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Penilaian Mandiri Tim Sekretariat Ditjen PKRL, dimana kategori dan predikat penilaian PM SAKIP adalah sebagaimana disajikan pada table berikut:

Tabel 9. Kategori dan Predikat Nilai PM SAKIP

Predikat	Nilai	Interpretasi
AA	>90-100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A	>80-90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB	>70-80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B	>60-70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC	>50-60	Cukup Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C	>30-50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D	0-30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Target indikator kinerja manajerial Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 88. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 10. Capaian Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 5. Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	90,75	-	-	-	-	88	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target tahunan, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah terdapat adanya perubahan kelembagaan unit organisasi Eselon I, dimana Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut kini bertransformasi menjadi dua unit baru yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut sesuai dengan Permen KP RI No. 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melakukan penyesuaian perjanjian kinerja tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Verifikasi Pelaporan Online Triwulan IV Tahun 2024 Lingkup DJPKRL tanggal 12-17 Januari 2025
- Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL tanggal 20-22 Januari 2025
- Finalisasi Dokumen Perencanaan Kinerja Lingkup DJPKRL Tahun 2025 tanggal 23-24 Januari 2025
- Reviu Laporan Kinerja Tahun 2024 Lingkup Ditjen PKRL tanggal 5-7 Februari 2025
- Dialog Kinerja Lingkup BKKPN Kupang tanggal 18 Februari 2025
- Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala bulanan



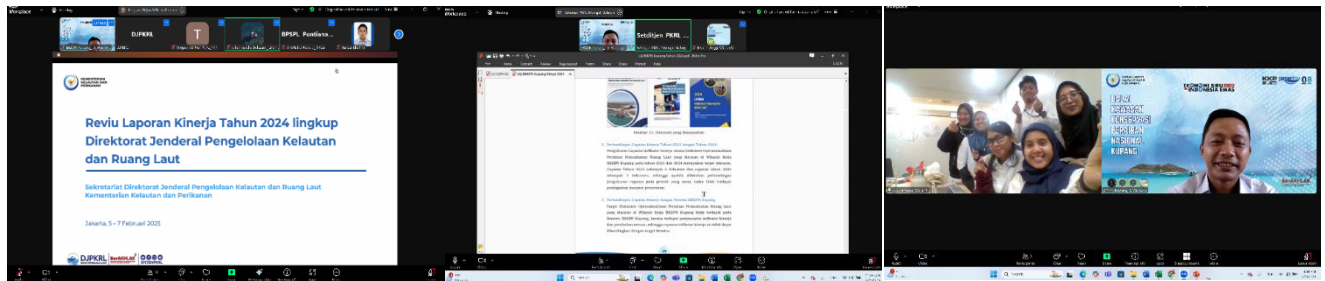
Gambar 12. Verifikasi Pelaporan Online



Gambar 13. Penyusunan Laporan Kinerja



Gambar 14. Finalisasi Dokumen Perencanaan



Gambar 15. Reviu Laporan Kinerja



Gambar 16. Dialog Kinerja tahun 2025



Gambar 17. Monitoring pelaksanaan program kegiatan berkala

3.5.2 IKM 6 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran dengan memperhitungkan 7 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan bobot nilai sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11. indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan bobot nilai

No	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Bobot Nilai (%)
1	Revisi DIPA	10
2	Deviasi RDP (Halaman III DIPA)	15
3	Penyerapan Anggaran	20
4	Belanja Kontraktual	10
5	Penyelesaian Tagihan	10
6	Pengelolaan UP dan TUP	10
7	Capaian Output	25
Jumlah		100

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
2. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
3. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
4. Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target indikator kinerja manajerial Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 92. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 6. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	99,56	-	-	-	-	92	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang merupakan target semesteran, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target semesteran, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja pada saat ini adalah Penyerapan anggaran masih rendah, dimana sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini baru terealisasi sebesar 6,31%, hal ini dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran sesuai Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program Oceans for Prosperity Project-LAUTRA sesuai surat Dirjen PKRL Nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 tanggal 21 Januari 2025.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melakukan penyesuaian rencana penarikan dana (RPD) pada halaman III DIPA BKKPN Kupang tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Penyusunan dan penyampaian rencana penarikan dana;
- Penyampaian data kontrak;
- Pengelolaan UP dan TUP;
- Konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAKTI.

3.5.3 IKM 7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran.

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Kategori Capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

- a. Sangat Baik, apabila NKPA > 90 ;
- b. Baik, apabila NKPA $>80 - 90$;
- c. Cukup, apabila NKPA $>60 - 80$;
- d. Kurang, apabila NKPA $>50 - 60$;
- e. Sangat Kurang, apabila ≤ 50

Cara perhitungan capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu yang didapatkan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara Capaian RO, Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 71,5. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 13. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 7. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	f=e/d*100%	g	h=e/g*100%	i=(e-a)/a*100%
-	94,42	-	-	-	-	71,5	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target tahunan, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Hingga saat ini belum terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja, hal ini disebabkan aplikasi Monev Kemenkeu yang digunakan belum terkoneksi dengan aplikasi SAKTI.

Solusi yang dapat dilakukan guna menyelesaikan kendala tersebut pada periode berikutnya adalah melakukan pemantauan berkala terhadap aplikasi yang digunakan yaitu aplikasi monev Kemenkeu yang dapat diakses melalui tautan <https://monev.kemenkeu.go.id/User>.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan pendukung capaian yaitu Konfirmasi capaian output melalui aplikasi SAKTI.

3.5.4 IKM 8 Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang

Penyelenggaraan SPIP berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10/Permen-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Laporan SPIP yang disusun adalah Laporan SPIP yang disusun setiap unit kerja sebagai bagian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan DJPKRL. Laporan SPIP triwulan adalah laporan yang disusun pada periode Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan Menginventarisasi dan Menjumlahkan dokumen laporan SPIP yang telah disusun dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I.

Target indikator kinerja manajerial Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 4 Dokumen. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 14. Capaian Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang
Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 8. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
1	4	-	1	1	100 (100)	4	25	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 1 Dokumen, adapun capaian indikator kinerja adalah laporan SPIP triwulan IV tahun 2024 yang telah disampaikan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui surat nomor B.110/BKKPN/TU.140/I/2025 Tanggal 10 Januari 2024 Perihal Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024 BKKPN Kupang.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan I tahun 2024 adalah sebanyak 1 dokumen, sedangkan capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 1 dokumen, sehingga apabila dilakukan perbandingan pada periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian dikarenakan realisasi capaian sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Target capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebanyak 4 dokumen, sedangkan capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebanyak 1 dokumen, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini telah tercapai 25% dari target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari peran Sekretariat Ditjen PKRL yang secara rutin melakukan pemantauan laporan SPIP setiap bulan terhadap unit kerja dibawahnya, oleh karenanya target indikator kinerja BKKPN Kupang dapat tercapai 100%.

Hingga saat ini belum terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja, namun untuk mencapai target pada periode berikutnya, maka yang akan dilakukan BKKPN Kupang adalah melakukan penyusunan laporan SPIP periode triwulan I tahun 2025, yang akan dijadikan sebagai capaian pada periode triwulan II tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan pendukung capaian yaitu Penyusunan laporan SPIP triwulan IV tahun 2024 dan Penilaian Risiko Tahun 2025.

3.5.5 IKM 9 Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019. Kategori Penilaian Indeks Profesionalitas ASN antara lain :

- 91-100 Sangat Tinggi;
- 81-90 Tinggi;
- 71-80 Sedang;
- 61-70 Rendah; dan
- < 60 Sangat Rendah.

Target indikator kinerja manajerial Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 87. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang
Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 9. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	91,27	-	-	-	-	87	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang Lingkup BKKPN Kupang merupakan target semesteran, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target semesteran, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara semesteran, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja adalah hingga saat ini aplikasi penghitungan IP ASN KKP belum terupdate, sehingga belum diketahui perkembangan nilai IP ASN BKKPN Kupang.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mencapai target pada periode berikutnya adalah melakukan pemantauan perkembangan IP ASN BKKPN Kupang dan mendorong para pegawai untuk dapat mengikuti pendidikan dan atau pelatihan guna memenuhi aspek kompetensi pengukuran IP ASN.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Pelaksanaan Tugas Belajar
- Sebagian pegawai telah mengikuti seminar dan/atau diklat 20 JP.
- Peningkatan kinerja individu pegawai dengan pembagian peran hasil.
- Pemantauan atas kedisiplinan pegawai melalui epresensi.

3.5.6 IKM 10 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode Triwulan IV tahun 2024 sampai dengan Triwulan III tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh BKKPN Kupang.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan rekomendasi Itjen yang telah tuntas ditindaklanjuti BKKPN Kupang dibagi jumlah rekomendasi yang diberikan kepada BKKPN Kupang dikali 100. Dengan catatan (1) Jika tidak ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan oleh Itjen maka perhitungan capaian 100, (2) Jika ada Audit/Reviu/evaluasi/pemantauan namun tidak ada Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti maka, perhitungan capaian 100.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 95%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 10. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	f=e/d*100%	g	h=e/g*100%	i=(e-a)/a*100%
100	100	-	95	100	105,26 (105,26)	95	105,26	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%, sesuai dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor B.104/DJPK.1/HP.130/IV/2025 tanggal 15 April 2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK” Periode Triwulan I Tahun 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan I tahun 2024 adalah sebesar 100%, sedangkan capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga apabila dilakukan perbandingan pada periode yang sama, maka tidak terdapat kenaikan maupun penurunan capaian dikarenakan realisasi capaian sama.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Target capaian indikator kinerja ini pada tahun 2025 adalah sebesar 95%, sedangkan capaian pada triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%, sehingga apabila dilakukan perbandingan, maka sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini telah tercapai 105,26% dari target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja ini tidak terlepas dari komitmen pimpinan yang melakukan pemantauan secara rutin setiap bulan dan menyampaikan tindak lanjut hasil pengawasan secara tepat waktu, oleh karenanya target indikator kinerja BKKPN Kupang dapat tercapai 105,26% dari target.

Hingga saat ini belum terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja, namun untuk mencapai target pada periode berikutnya, maka yang akan dilakukan BKKPN Kupang adalah melaksanakan tindak lanjut apabila ada hasil pengawasan periode berikutnya.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan pendukung capaian yaitu pelaksanaan audit pertanggungjawaban keuangan dan realisasi anggaran kegiatan Lautra oleh Itjen KKP tanggal 20-31 Januari 2025 dan Penyampaian dokumen tindak lanjut hasil audit.

3.5.7 IKM 11 Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang

Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang yang diselesaikan adalah temuan yang ditampilkan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan BKKPN Kupang Tahun 2024. Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan temuan LHP BPK BKKPN Kupang yang diselesaikan dibagi jumlah temuan dalam LHP BPK BKKPN Kupang dikali 100%. Dengan catatan Jika tidak ada pemeriksaan BPK atau tidak ada rekomendasi yang ditindaklanjuti, maka perhitungan capaian adalah sama dengan target.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 100%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17. Capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 11. Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	100	-	-	-	-	100	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target tahunan, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025 tidak dilakukan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Hingga saat ini belum terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja, namun demikian untuk mencapai target kinerja, pada periode berikutnya akan dilakukan pelaksanaan tindak lanjut atau penyelesaian atas temuan BPK apabila ada.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Rekonsiliasi SAKTI Satker Lingkup DJPKRL dengan UAPPA E1 Periode Tahun 2024 (14-16 Januari 2025)



Gambar 18. Rekonsiliasi SAKTI

3.5.8 IKM 12 Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang

Suatu predikat yang diperoleh Unit Kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Standar penilaian antara lain: Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 85 dengan minimal nilai pengungkit adalah 48, Bobot nilai per area pengungkit minimal 75% untuk semua area pengungkit, Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 19,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 15,75 dan sub komponen “Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya” minimal 3,5, dan Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 15,75.

Cara perhitungan capaian indikator kinerja ini adalah Hasil penilaian Tim Penilai Internal KKP (inspektorat V) dan/atau inspektorat mitra DJPKRL dan/atau tim pembangunan zona integritas DJPKRL. Dengan catatan Jika pada tahun anggaran berjalan tidak dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal, maka capaian yang digunakan adalah capaian nilai WBK tahun sebelumnya.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 85. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18. Capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang
Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 12. Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	f=e/d*100%	g	h=e/g*100%	i=(e-a)/a*100%
-	-	-	-	-	-	85	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga pada periode saat ini dan periode selanjutnya tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung dalam keberhasilan pembangunan zona integritas adalah adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh pegawai dalam membangun zona integritas, penerapan budaya kerja BerAKHLAK dan LEBE BAE, peningkatan integritas, peningkatan pelayanan dan peningkatan kinerja, serta penciptaan inovasi yang memiliki dampak besar.

Kendala yang dihadapi berdasarkan hasil pemantauan Pembangunan zona integritas yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal pada awal tahun 2025 ditemukan masih terdapat kekurangan dalam pemenuhan dokumen pengungkit dan reform.

Solusi yang dapat dilakukan pada periode berikutnya guna pencapaian target kinerja adalah melakukan pemantauan berkala Pembangunan zona integritas dan pemenuhan dokumen pengungkit dan reform.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Pembentukan Tim Pembangunan ZI BKKPN Kupang Tahun 2025;
- Penyusunan Rencana Aksi PZI tahun 2025;
- *Sharing Session* PZI dengan Poltek KP Kupang tanggal 31 Januari 2025;
- Pemantauan Pembangunan ZI tanggal 25 Februari - 3 Maret 2025;
- Internaliasi Pembangunan ZI bersama Kejati NTT tanggal 11 Maret 2025.



Gambar 19. Sharing Session PZI Poltek KP Kupang



Gambar 20. Pemantauan PZI Oleh TPI



Gambar 21. Internalisasi Pembangunan ZI

3.5.9 IKM 13 Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya untuk perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat.

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan.

Audit Kearsipan Internal adalah Audit Kearsipan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal atas pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip. Pengawasan kearsipan internal yang menjadi tanggung jawab KKP dimana Biro Umum dan PBJ melakukan pengawasan kearsipan internal meliputi:

1. Pengawasan sistem kearsipan internal

Aspek penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi:

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip;
- b. Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, dan prasarana serta sarana.

2. Pengawasan Pengelolaan Arsip Aktif

Aspek penilaian dalam pengawasan pengelolaan arsip aktif meliputi pemberkasan dan penyimpanan arsip aktif yang disesuaikan dengan daftar isian pelaksanaan anggaran, daftar pelaksanaan anggaran.

3. Pengawasan penyelamatan arsip statis internal

Aspek penilaian dalam pengawasan penyelamatan arsip statis sebagaimana dimaksud meliputi pengelolaan arsip dinamis yang berdasarkan JRA berketerangan permanen atau memiliki nilai guna kesejarahan.

Cara pengukuran capaian indikator kinerja Nilai Pengawasan Internal Kearsipan Lingkup BKKPN Kupang adalah sebagai berikut :

1. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang akan diukur oleh Biro Umum dan PBJ dengan pembentukan Tim Penilai yang ditetapkan melalui Surat Keputusan dan hasil penilaian tersebut akan disampaikan melalui surat resmi.
2. Nilai pengawasan kearsipan internal BKKPN Kupang merupakan hasil dari kumulatif penilaian instrument-instrumen yang terdiri dari 2 aspek dengan sistem pembobotan seperti dibawah ini:
 - a. Aspek Pengelolaan Arsip Dinamis yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Penciptaan Arsip
 - Penggunaan Arsip
 - Pemeliharaan Arsip
 - Penyusutan Arsip

Dengan bobot masing-masing sub aspek 25 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
 - b. Aspek Sumberdaya Kearsipan yang terdiri dari komponen-komponen atau sub aspek:
 - Sumberdaya Manusia Kearsipan
 - Sarana dan Prasarana Kearsipan

Dengan bobot masing-masing sub aspek 50 % untuk selanjutnya dikalikan dengan nilai yang diperoleh terhadap masing-masing komponen.
3. Nilai dan kategori atas hasil Pengawasan Kearsipan yang diperoleh dari penilaian terhadap Objek Pengawasan berupa:
 - AA: Sangat Memuaskan = >90-100
 - A: Memuaskan = >80-90

- BB: Sangat Baik = >70-80
- B: Baik = >60-70
- CC: Cuku = >50-60
- C: Kurang = >30-50
- D: Sangat Kurang = 0-30

Target indikator kinerja manajerial Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 80. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 19. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 13. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	f=e/d*100%	g	h=e/g*100%	i=(e-a)/a*100%
-	81,11	-	-	-	-	76	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Pengukuran capaian indikator kinerja ini pada tahun 2024 maupun tahun 2025 merupakan target tahunan, sehingga pada periode saat ini tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Hingga saat ini BKKPN Kupang belum BKKPN Kupang belum memiliki SDM dengan jabatan fungsional Arsiparis, namun demikian telah ditetapkan pengelola arsip Lingkup BKKPN Kupang yang telah memiliki sertifikat diklat bidang arsip.

Solusi yang dapat dilakukan pada periode berikutnya guna pencapaian target kinerja adalah menyelenggarakan pengelolaan arsip sesuai dengan kaidah dan standar kearsipan dan menyiapkan bahan penilaian pengawasan kearsipan.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Penetapan Tim Pengelola Arsip BKKPN Kupang
- Pengelolaan Arsip Dinamis BKKPN Kupang tahun 2025

3.5.10 IKM 14 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP.

Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja).

Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Target indikator kinerja manajerial Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 76%. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20. Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 14. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (%)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	$f=e/d*100\%$	g	$h=e/g*100\%$	$i=(e-a)/a*100\%$
-	-	-	76	100	131,58 (120)	76	131,58 (120)	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang pada periode triwulan I tahun 2025 adalah sebesar 100%, sesuai dengan aplikasi SIRUP dan Nota Dinas Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang /Jasa Nomor 2/SJ.7/TU.140/IV/2025 tanggal 14 April 2025 perihal Capaian IKU “Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja Persentase Rencana Umum Pengadaan di Lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan I Tahun Anggaran 2025.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga pada periode saat ini dan periode selanjutnya tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Capaian indikator kinerja ini pada periode triwulan I tahun 2025 adalah 100% dari target 76%, sehingga apabila dilakukan perbandingan capaian

kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025, maka tercapai 131,58% atau 120% pada kinerjaku.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Faktor pendukung dalam keberhasilan pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya komitmen dari pimpinan dalam mengumumkan paket pengadaan barang/jasa pada platform SIRUP.

Hingga saat ini tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja.

Solusi yang dapat dilakukan pada periode berikutnya guna menjaga hasil capaian kinerja adalah akan dilakukan *update* bila terdapat perubahan pagu anggaran tahun 2025.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan kegiatan pendukung capaian yaitu pengumuman data paket pengadaan barang jasa pada aplikasi SIRUP.

No	Kode	Nama Program	Pagu Program	Pagu Pengadaan	Pagu Terumuman	Selsih	Persentase
1	FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup	40,202,000,000	30,637,900,000	30,637,900,000	0	100.00%
2	HB	Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	575,000,000	152,970,000	152,970,000	0	100.00%
3	WA	Program Dukungan Manajemen	4,969,447,000	3,457,077,000	3,457,077,000	0	100.00%

Gambar 22. Pengumuman PBJ pada SIRUP

3.5.11 IKM 15 Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang

Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu hal penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi badan publik atau institusi pemerintahan. Badan publik dituntut untuk berbenah diri melakukan perubahan sejalan dengan tuntutan masyarakat serta pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini juga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dimana badan-badan publik memiliki kewajiban menyampaikan informasi yang dikuasainya.

Salah satu pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yakni dilakukannya monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Sesuai dengan peraturan tersebut bahwa monev keterbukaan informasi publik dilakukan 1 kali dalam 1 tahun anggaran.

Aspek penilaian dalam keterbukaan informasi publik meliputi 5 komponen indikator yaitu: mengumumkan informasi publik, menyediakan informasi publik, sarana dan prasarana, kelembagaan, dan digitalisasi.

Monev Keterbukaan Informasi Publik dilakukan melalui pengisian SAQ (Self Assesment Questionnaire) yang disediakan oleh Biro Humas Kerja Sama dan Luar Negeri yang mengacu pada format kuesioner Komisi Informasi Pusat oleh Tim Penilai Internal KKP.

Hasil penilaian keterbukaan informasi publik merupakan hasil dari kumulatif penilaian dengan sistem pembobotan yang terdiri atas pengisian SAQ sebanyak 80 % dan presentasi sebanyak 20 %.

Nilai dan predikat atas hasil penilaian keterbukaan informasi publik yang diperoleh dari tim penilai internal KKP berupa yaitu

- skor 90-100 predikat informatif;
- skor 80-89,9 predikat menuju informatif;
- skor 60-79,9 predikat cukup informatif;

- skor 40-59,9 predikat kurang informatif; dan
- skor < 39,9 predikat tidak informatif.

Target indikator kinerja manajerial Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 91. Capaian indikator kinerja pada periode saat ini disajikan pada tabel berikut:

Tabel 21. Capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang
Triwulan I Tahun 2025

SK 5. Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang								
IKM 15. Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang (Nilai)								
Realisasi Tahun 2024		Realisasi Periode Berjalan				Realisasi Tahun 2025		
Triwulan I	2024	Realisasi Triwulan Sebelumnya	Target Triwulan I	Realisasi Triwulan I	% Capaian (% Kinerjaku)	Target PK	% Realisasi Terhadap PK (% Kinerjaku)	% Kenaikan dari Tahun Sebelumnya
a	b	c	d	e	f=e/d*100%	g	h=e/g*100%	i=(e-a)/a*100%
-	-	-	-	-	-	91	-	-

Sumber Data: BKKPN Kupang 2025

1. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang merupakan target tahunan, sehingga sampai dengan periode triwulan I tahun 2025 ini belum dapat dilakukan pengukuran, namun demikian telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian.

2. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2024 dengan Triwulan I 2025

Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja baru yang digunakan pada tahun 2025, sehingga pada periode saat ini dan periode selanjutnya tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I 2025 dengan Target Tahunan

Dikarenakan pengukuran capaian indikator kinerja ini dilakukan secara tahunan, maka tidak dapat dilakukan perbandingan capaian kinerja triwulan I tahun 2025 dengan target tahun 2025.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan dan Solusi

Hingga saat ini belum terdapat kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja ini.

Kegiatan yang akan dilakukan pada periode berikutnya guna pencapaian target kinerja adalah melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Analisis Kegiatan Penunjang Capaian Kinerja

Untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan hingga triwulan I tahun 2025 ini telah dilakukan beberapa kegiatan pendukung capaian antara lain:

- Pembentukan Tim pengelola PPID Tahun 2025;
- Penyediaan dan pengumuman informasi publik tahun 2025;
- Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Lingkup KKP tanggal 23 Januari 2024.



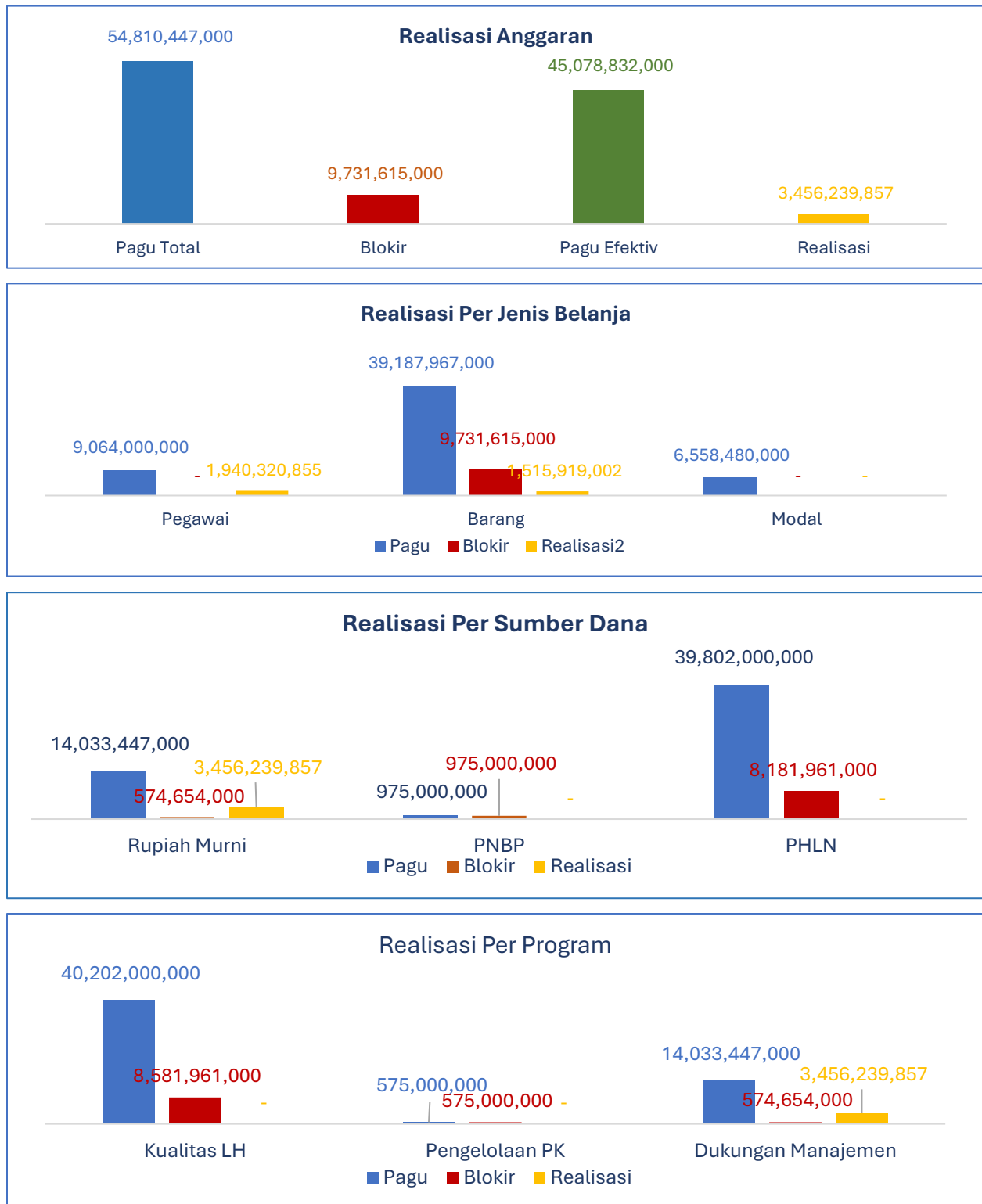
Gambar 23. Presentasi Uji Publik Monev KIP

3.6 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi pagu anggaran belanja BKKPN Kupang digunakan untuk mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2025 sesuai dengan Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp54.810.447.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.731.615.000, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp45.078.832.000 dengan **realisasi anggaran** sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **Rp3.456.239.857** atau **6,31%** dari pagu anggaran. Realisasi anggaran BKKPN Kupang sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 22. Realisasi Anggaran BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Sisa Anggaran / Efisiensi (Rp)	Blokir (Rp)	Optimal Pagu (Rp)
1	BKKPN Kupang	54.810.447.000	3.456.239.857	6,31	51.354.207.143	9.731.615.000	45.078.832.000
JUMLAH		54.810.447.000	3.456.239.857	6,31	51.354.207.143	9.731.615.000	45.078.832.000



Gambar 24. Realisasi Belanja BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

Realisasi anggaran BKKPN Kupang sangat mendukung untuk pencapaian kinerja BKKPN Kupang pada tahun 2025. Seluruh kegiatan dengan capaian yang dikendalikan oleh BKKPN Kupang sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini tercapai dengan baik sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, Adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp723.569.901 atau tercapai 41,35% dari target yang diperoleh dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu, penerimaan Kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu, pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin, serta pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya atas penerbitan izin aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi berupa tanda masuk dan karcis masuk. Realisasi pendapatan BKKPN Kupang sampai dengan triwulan I tahun 2025 disajikan pada gambar dan tabel berikut:



Gambar 25. Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Tahun 2025

Tabel 23. Realisasi Pendapatan BKKPN Kupang Triwulan I Tahun 2025

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1	Penerimaan kembali belanja pegawai TAYL	6.392.518
2	Penerimaan Kembali belanja barang TAYL	580.000
3	Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	5.327.383
4	Pendapatan jasa kelautan dan perikanan lainnya	711.270.000
	Jumlah	723.569.901



3.7 Capaian Kinerja Lainnya / Penghargaan

Selain pencapaian target indikator kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja BKKPN Kupang, sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini telah memperoleh beberapa capaian kinerja lainnya atau penghargaan yang diterima atas praktik-praktik baik pemerintahan dalam mewujudkan nilai-nilai **BerAKHLAK** (**B**erorientasi Pelayanan, **A**kuntabel, **K**ompeten, **H**armonis, **L**oyal, **A**datif, **K**olaboratif) dan budaya organisasi **LEBE BAE** (**L**ayanan prima, **E**mpati, **B**erani jujur, **E**fektif dan efisien, **B**ersih dari KKN, **A**kuntabel, **E**ksis), Capaian kinerja lainnya yaitu sebagai berikut :

1. UPT dengan PNPB Tertinggi Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
2. Nilai Kinerja Organisasi Istimewa (113,98) Triwulan IV Tahun 2024;
3. UPT Terbaik 1 Implementasi SAKIP Tahun 2024 Lingkup DJPKRL; dan
4. Unit Organisasi Informatif Tahun 2024 Lingkup KKP.



Gambar 26. Penghargaan Triwulan I Tahun 2025

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKKPN Kupang triwulan I tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun permasalahan capaian BKKPN Kupang pada periode bersangkutan, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja.

Pengukuran capaian kinerja BKKPN Kupang dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja BKKPN Kupang terdiri dari 15 (lima belas) indikator kinerja. Pada periode triwulan I tahun 2025 sesuai dengan kinerjaku.kkp.go.id Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh adalah **109,47 (baik)**. Capaian kinerja BKKPN Kupang periode triwulan I tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. Dua Indikator Kinerja dengan capaian melebihi target yaitu:
 1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (Target 95%, Realisasi 100%);
 2. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang (Target 76%, Realisasi 100%);
- b. Empat Indikator Kinerja dengan capaian 100%, yaitu:
 1. Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Target 1 Dokumen, Realisasi 1 Dokumen);

Jumlah pagu anggaran BKKPN Kupang tahun 2025 adalah sebesar Rp54.810.447.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Pinjaman Luar Negeri (PLN), namun demikian terdapat adanya blokir pagu anggaran dalam rangka efisiensi

atas pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp9.731.615.000, sehingga pagu anggaran optimal yang dapat digunakan untuk pencapaian target indikator kinerja pada tahun 2025 ini adalah sebesar Rp45.078.832.000 dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar Rp3.456.239.857 atau 6,31% dari pagu anggaran.

Selain itu, BKKPN Kupang juga turut berkontribusi terhadap penerimaan negara, adapun target perkiraan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) BKKPN Kupang pada tahun 2025 adalah sebesar Rp1.750.000.000, realisasi pendapatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah sebesar Rp723.569.901 atau tercapai 41,35% dari target.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025 BKKPN Kupang telah memperoleh beberapa penghargaan atas prestasi dan kinerja yang telah dilakukan, antara lain sebagai berikut:

5. UPT dengan PNBP Tertinggi Tahun 2024 Lingkup DJPKRL;
6. Nilai Kinerja Organisasi Istimewa (113,98) Triwulan IV Tahun 2024;
7. UPT Terbaik 1 Implementasi SAKIP Tahun 2024 Lingkup DJPKRL; dan
8. Unit Organisasi Informatif Tahun 2024 Lingkup KKP.

Berdasarkan kondisi existing pelaksanaan kinerja organisasi serta pelaksanaan program dan kegiatan BKKPN Kupang pada periode Triwulan I Tahun 2025 terdapat beberapa tantangan yang menjadi perhatian antara lain:

1. Pelaksanaan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 belum dapat dilakukan secara optimal yang disebabkan oleh:
 - Adanya blokir alokasi anggaran atas pelaksanaan efisiensi sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025;
 - Adanya penghentian pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri (PHLN) program *Oceans for Prosperity Project-LAUTRA*; dan

- Adanya transformasi struktur kelembagaan unit kerja Eselon I sebagai unit kerja atasan.
- 2. Hasil pemantauan pembangunan zona integritas BKKPN Kupang oleh tim penilai internal belum optimal.

4.2. Rekomendasi

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi guna menjawab tantangan tersebut dan/atau dilaksanakan pada periode berikutnya, yaitu:

- 1 Perlu melakukan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 dengan penyesuaian indikator kinerja dan target kinerja sesuai struktur kelembagaan yang baru;
- 2 Perlu melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2025 lingkup BKKPN Kupang;

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

Rekomendasi pada periode sebelumnya telah dilakukan tindak lanjut, dengan bukti sebagaimana dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 24. Tindak Lanjut Rekomendasi Periode Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
1	Perlu dilakukan pemantauan aktivitas pemanfaatan kawasan konservasi yang melibatkan aparat penegak hukum, pelaksanaan sosialisasi dan publikasi perizinan pemanfaatan kawasan konservasi yang berkelanjutan kepada pihak terkait, peningkatan kapasitas petugas pelayanan perizinan melalui internalisasi;	1. Belum dilakukan pelibatan APH dalam kegiatan disebabkan adanya kebijakan efisiensi atas Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan Surat Dirjen PKRL nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025 terkait penghentian sementara project LAUTRA 2. Telah dilaksanakan Internalisasi /pembahasan forum konsultasi publik reuiu standar pelayanan Balai KKPNN Kupang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025	https://drive.google.com/drive/folders/117X61OOQ1yIkd2JEPmCI MYMKBTU4SkIXB?usp=drive_link
2	Perlu dilakukan peningkatan pelibatan stakeholders terkait dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan konservasi, dan peningkatan kapasitas SDM	1. Belum dilakukan disebabkan adanya kebijakan efisiensi atas Inpres Nomor 1 tahun 2025 dan Surat Dirjen PKRL nomor B.94/DJPKRL/TU.210/I/2025	https://drive.google.com/drive/folders/1SeuxzfO7qTDOi-

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Link Bukti Dukung
	Pengelola melalui pendidikan maupun pelatihan;	terkait penghentian sementara project LAUTRA; 2. Telah dilaksanakan perencanaan Tugas Belajar untuk pengelola kawasan konservasi Laut Banda sesuai surat Usulan Rencana Kebutuhan Tugas Belajar dan Izin Belajar Tahun 2025 nomor B.474/BKKPN/KP.210/III/2025	MUZ_LCUT5tCgg0EK_Gb?usp=drive_link
3	Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi jejaring dan kemitraan konservasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam menginisiasi kemitraan konservasi;	1. Sosialisasi Kemitraan pengelolaan kawasan konservasi tanggal 19 Maret 2025 dengan para pemegang izin SIUPKK;	https://drive.google.com/drive/folders/1NH2dcWVmrzDRxzUmiO0CWPV0seFKaop?usp=drive_link
4	Perlu ditetapkan tim pembangunan zona integritas yang selaras dengan pekerjaan sehari-hari, penyusunan rencana aksi pembangunan zona integritas yang konkrit dan dilakukan pemantauan secara berkala;	1. Telah ditetapkan tim PZI 2025, disusun rencana aksi PZI 2025 dan pemantauan rutin secara bulanan;	https://drive.google.com/drive/folders/1FLv736w-ihSy-4HPknUOMwRDPojP_GhX?usp=drive_link
5	Perlu mengusulkan kebutuhan arsiparis dan/atau menetapkan pengelola arsip yang telah memiliki kompetensi di bidang arsip.	1. Telah menetapkan pengelola arsip BKKPN Kupang Tahun 2025 sesuai kriteria melalui Surat Tugas nomor B.487/BKKPN/TU.210/III/2025.	https://drive.google.com/drive/folders/15nN2Ja1dI_XiEpVAYOK_DxRIfEzt5xH9S?usp=drive_link

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja





**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL sespridirjenprl@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Imam Fauzi**

Jabatan : Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	1.	Nilai Efektivitas Kawasan Konservasi Nasional Wilayah Kerja BKKPN Kupang (%)	85,05
2.	Meningkatnya Pelaksanaan Kemitraan untuk Mendukung Konservasi yang efektif di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	2.	Kemitraan Konservasi yang Diinisiasi di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Kesepakatan)	2
3.	Terselenggaranya Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Laut di Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	3.	Dokumen Operasionalisasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	2
4.	Tersusunnya Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil di Wilayah Kerja BKKPN Kupang	4.	Dokumen Identifikasi Pemanfaatan Pulau - Pulau Kecil yang disusun di Wilayah Kerja BKKPN Kupang (Dokumen)	1
5.	Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik Lingkup BKKPN Kupang	5.	Nilai PM SAKIP Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	88
		6.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	92
		7.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	71,5
		8.	Laporan SPIP yang Disusun Lingkup BKKPN Kupang (Dokumen)	4
		9.	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup BKKPN Kupang (Indeks)	87
		10.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BKKPN Kupang (%)	95

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
		11.	Persentase Penyelesaian Temuan LHP BPK Lingkup BKKPN Kupang (%)	100
		12.	Nilai Unit Kerja Berpredikat Menuju WBBM BKKPN Kupang (Nilai)	85
		13.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Lingkup BKKPN Kupang (Nilai)	80
		14.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP Lingkup BKKPN Kupang	76
		15.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik BKKPN Kupang	91

Data Anggaran

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan	40.202.000.000
2.	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000
3.	Penataan Ruang Laut	375.000.000
4.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	14.033.447.000
Total Anggaran Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang Tahun 2025		54.810.447.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut


Victor Gustaaf Manoppo

Pihak Pertama
Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional Kupang


Imam Fauzi

Laporan SPIP





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG

JL. YOS SUDARSO, ALAK, KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 85231
TELP. (0380) 890421 LAMAN www.kkp.go.id SUREL bkkpn_kupang@kkp.go.id

Nomor : B.110/BKKPN/TU.140/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan SPIP Triwulan IV Tahun 2024

Yth. 1. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelutan dan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengeloaan Kelautan dan Ruang Laut
di Jakarta

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMENKP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor B B.73/DJPKRL.1/TU.140/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 Perihal Pelaporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Penyelenggaran SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang untuk Triwulan IV tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/PelaporanSPIP> dan <https://bit.ly/EvalMR2024>

Demikian laporan ini disampaikan, atas arahan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BKKPN Kupang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Imam Fauzi



LAPORAN TRIWULAN IV SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan
Ruang Laut
Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional
(BKKPN) Kupang

TAHUN 2024

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Yang Maha Kuasa, Laporan Penyelenggaraan SPIP Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang periode bulan Triwulan IV tahun 2024 telah diselesaikan. Penyusunan laporan ini merupakan kewajiban atas pelaksanaan pengendalian intern di lingkungan Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang. Perbaikan terus menerus kami lakukan dalam pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan SPIP, tentunya masih banyak kekurangan sehingga masukan dan saran kami perlukan demi perbaikan pada periode berikutnya

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan terlibat dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini bermanfaat, khususnya bagi pengambil kebijakan lingkup Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang dapat mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Kupang, 9 Januari 2025

Kepala Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional (BKKPN) Kupang,



Imam Fauzi

Rekomendasi Pengawasan





KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAM www.kkp.go.id SUREL dirjenpk@kkp.go.id

Nomor : B. 104 /DJPK.1/HP.140/IV/2025 15 April 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025

Yth.

1. Para Direktur Lingkup Ditjen PK
2. Para Direktur Lingkup Ditjen PRL
3. Para Kepala UPT Lingkup Ditjen PK
4. Koordinator Bagian Program

Menindaklanjuti Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP nomor: 397/ITJ.0/TU.140/IV/2025 tanggal 10 April 2025 hal Capaian IKU "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP" Triwulan I Tahun 2025, bersama ini disampaikan capaian IKU Direktorat dan UPT Lingkup Direktorat Jenderal PK sebagai berikut:

1. Realisasi capaian IKU diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2024 sampai dengan Triwulan I Tahun 2025 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas pada masing-masing Satker Lingkup Ditjen PK;
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga Triwulan I Tahun 2025 lingkup Ditjen PK sebesar 88,64% yaitu sebanyak 78 rekomendasi telah berstatus tuntas dari 88 rekomendasi yang diterbitkan;
3. Rincian capaian IKU tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dan sisa temuan yang belum tuntas sebagaimana terlampir;
4. Atas rekomendasi yang sudah tuntas, kami menyampaikan apresiasi kepada satker terkait dan untuk rekomendasi yang belum tuntas agar segera dituntaskan sebelum Triwulan ke II Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

an Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Miftahul Huda

Tembusan:

1. Direktur Jenderal PK
2. Direktur Jenderal PRL

Data Rekapitulasi Capaian IKU
"Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan
Kinerja Lingkup Ditjen PK" Triwulan I Tahun 2025

No	Satker	Rekomendasi (Jumlah)	Tindak Lanjut		Sisa Rekomendasi		% Capaian IKU
			Jumlah	(%)	Jumlah	(%)	
1	Setditjen PK	14	12	85,71	2	14,29	85,71
2	Dit. PRL	4	3	75,00	1	25,00	75,00
3	Dit. P4K	14	14	100	0	0	100
4	Dit. Jaskel	19	12	63,16	7	26,84	63,16
5	Dit. KKHL	8	8	100	0	0	100
6	BKKPN Kupang	11	11	100	0	0	100
7	BPSPL Makasar	11	11	100	0	0	100
8	BPSPL Padang	0	0	0	0	0	100
9	LPSPL Sorong	0	0	0	0	0	100
10	LPSPL Serang	0	0	0	0	0	100
11	LKKPN Pekanbaru	7	7	100	0	0	100
12	BPSPL Denpasar	0	0	0	0	0	100
13	BPSPL Pontianak	0	0	0	0	0	100
14	Dekon/TP	0	0	0	0	0	100
Jumlah		88	78	88,64	10	11,36	88,64

a.n. Direktur Jenderal
Pengelolaan Kelautan,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Miftahul Huda

Persentase RUP



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
SEKRETARIAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025

Yth. : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal
8. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan
9. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
10. Direktur Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan
11. Para Kepala Biro/Pusat di Lingkungan Sekretariat Jenderal;

Dari : Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa

Hal : Penyampaian hasil perhitungan Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025

Lampiran : 1 Berkas

Tanggal : 14 April 2025

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya upaya optimalisasi kinerja Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Triwulan 1 tahun anggaran 2025 sebagai tindak lanjut atas terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yang kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, seluruh satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan tindak lanjut berupa identifikasi belanja

pengadaan (PBJ) yang terdampak efisiensi belanja dan dapat dipastikan tidak dapat direalisasikan sehingga tidak diumumkan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Total sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) Satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tersebar pada 10 (sepuluh) unit eselon 1 telah melakukan identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang akan disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kemudian dilanjutkan dengan melakukan revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi yang telah disusun tersebut. Sehingga, diharapkan dapat mencegah terjadinya persentase pengumuman RUP pada SIRUP yang melebihi 100% (seratus persen).

Data yang terbentuk pada kertas kerja klarifikasi untuk nilai Pagu Terumumkan pasca efisiensi, nantinya setelah dilakukan penyesuaian oleh LKPP dan digunakan sebagai acuan untuk menjadi Pagu Pengadaan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sedangkan, revisi RUP yg dilakukan satker pada SIRUP akan membentuk data baru sebagai Pagu Terumumkan di dalam Statistik Moner SIRUP. Sehingga, berdasarkan manual indikator perhitungan capaian IKU untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025, formula dan ketentuan perhitungannya sebagai berikut;

Formulasi pengukuran/penilaian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP} \times 100\%}{\text{Pagu Pengadaan Barang/Jasa}}$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini.

Berikut data hasil perhitungan capaian Indikator Kinerja untuk persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan KKP yang diumumkan pada SIRUP Triwulan 1 tahun anggaran 2025 pada setiap Unit Eselon 1;

No.	Nama Unit Eselon 1	Persentase RUP Terumumkan				% Capaian IKU TW 1
		Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	% RUP Terumumkan	
1	Inspektorat Jenderal	3,074,204,000.00	3,074,204,000.00	-	100.00%	100.00%
2	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	232,904,737,000.00	232,904,737,000.00	-	100.00%	100.00%
3	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	30,061,146,000.00	30,061,146,000.00	-	100.00%	100.00%
4	Sekretariat Jenderal	141,198,357,000.00	141,198,357,000.00	-	100.00%	100.00%
5	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	474,070,870,541.00	474,070,870,541.00	-	100.00%	100.00%
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	154,301,450,168.00	154,301,450,168.00	-	100.00%	100.00%
7	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan *	161,663,139,000.00	161,780,884,000.00	(117,745,000.00)	100.07%	99.93%
8	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap **	688,474,617,688.00	688,285,621,000.00	188,996,688.00	99.97%	99.97%
9	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan ***	42,318,573,722.00	42,715,615,722.00	(397,042,000.00)	100.94%	99.06%

Sebagai informasi, terdapat 6 (lima) satuan kerja lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan yang memperoleh capaian persentase RUP Terumumkan tidak 100% (seratus persen), yang disebabkan oleh adanya LEBIH / KURANG TERUMUMKAN di dalam SIRUP, antara lain;

❖ **Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**

- 1) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung persentase 101,52%;

❖ **Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap**

- 1) Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga persentase 139,11%;
- 2) Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon persentase 94,75%;
- 3) Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman persentase 79,56%;

❖ **Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

- 1) Sekretariat Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan persentase 105,75%.

Demikian kami sampaikan, atas atensi dan kerja sama dari seluruh pihak terkait dalam upaya peningkatan kinerja perencanaan PBJ yang telah dilaksanakan, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

Tembusan:
Sekretaris Jenderal

Lampiran
 Nomor : 2/SJ.7/TU.140/IV/2025
 Tanggal : 14 April 2025

Inspektorat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	INSPEKTORAT JENDERAL	12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	0	3,074,204,000	100.00%
	TOTAL	12,922,581,000	9,848,377,000	3,074,204,000	-	3,074,204,000	100.00%

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PKRL	261,203,332,000	104,939,270,000	156,264,062,000	0	156,264,062,000	100.00%
2	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT BPSPL PADANG	3,393,333,000	672,730,000	2,720,603,000	0	2,720,603,000	100.00%
3	LOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU	6,375,019,000	3,458,788,000	2,916,231,000	0	2,916,231,000	100.00%
4	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK	3,431,580,000	1,088,252,000	2,343,328,000	0	2,343,328,000	100.00%
5	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR	19,995,766,000	5,319,309,000	14,676,457,000	0	14,676,457,000	100.00%
6	BALAI PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT DENPASAR	6,830,966,000	1,496,560,000	5,334,406,000	0	5,334,406,000	100.00%
7	BALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL BKKPN KUPANG	34,247,947,000	7,929,570,000	26,318,377,000	0	26,318,377,000	100.00%
8	LOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG	4,620,954,000	1,558,667,000	3,062,287,000	0	3,062,287,000	100.00%
9	LOKA PENGELOLAAN SUMBERDAYA PESISIR DAN LAUT SORONG	25,399,451,000	6,130,465,000	19,268,986,000	0	19,268,986,000	100.00%
	TOTAL	365,498,348,000	132,593,611,000	232,904,737,000	-	232,904,737,000	100.00%

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PDSPKP	115,520,273,000	92,739,078,000	22,781,195,000	0	22,781,195,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PENGUJIAN PENERAPAN HASIL PERIKANAN	17,620,174,000	10,340,223,000	7,279,951,000	0	7,279,951,000	100.0000%
TOTAL		133,140,447,000	103,079,301,000	30,061,146,000	-	30,061,146,000	100.00%

Sekretariat Jenderal

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	LEMBAGA PENGELOLA MODAL USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN	4,747,944,000	1,244,617,000	3,503,327,000	0	3,503,327,000	100.0000%
2	BIRO UMUM dan PBJ SETJEN KKP	374,429,658,813	240,440,159,813	133,989,499,000	0	133,989,499,000	100.0000%
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	17,192,748,000	13,487,217,000	3,705,531,000	0	3,705,531,000	100.0000%
TOTAL		396,370,350,813	255,171,993,813	141,198,357,000	-	141,198,357,000	100.00%

 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI LAYANAN USAHA PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA KARAWANG	58,884,712,000	31,737,714,000	27,146,998,000	-	27,146,998,000	100.0000%
2	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUKABUMI	22,397,487,000	10,811,525,000	11,611,482,000	-	11,611,482,000	100.0000%
3	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU SITUBONDO	10,478,712,000	5,480,294,000	4,998,418,000	-	4,998,418,000	100.0000%
4	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR SUNGAI GELAM	15,964,411,000	7,870,111,000	8,094,300,000	-	8,094,300,000	100.0000%
5	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LAMPUNG	15,435,966,000	7,386,800,000	8,049,166,000	-	8,049,166,000	100.0000%
6	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR MANDIANGIN	10,922,447,000	5,112,980,000	5,809,467,000	-	5,809,467,000	100.0000%
7	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU TAKALAR	13,079,571,000	5,664,854,000	7,414,717,000	-	7,414,717,000	100.0000%
8	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT LOMBOK	4,664,595,000	2,736,731,000	1,927,864,000	-	1,927,864,000	100.0000%
9	BALAI PENGUJIAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN SERANG	5,053,928,000	2,164,272,000	2,889,656,000	-	2,889,656,000	100.0000%
10	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT BATAM	10,127,563,000	4,966,733,000	5,160,830,000	-	5,160,830,000	100.0000%
11	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU UJUNG BATEE	9,469,004,000	4,613,193,000	4,855,811,000	-	4,855,811,000	100.0000%
12	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR TATELU	6,938,438,000	4,125,531,000	2,812,907,000	-	2,812,907,000	100.0000%
13	BALAI PERIKANAN BUDIDAYA LAUT AMBON	11,918,263,000	5,179,650,000	6,738,613,000	-	6,738,613,000	100.0000%
14	BALAI PRODUKSI INDUK UDANG UNGGUL DAN KEKERANGAN KARANGASEM	7,324,563,000	3,248,807,459	4,075,755,541	-	4,075,755,541	100.0000%
15	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA	554,406,885,000	187,773,216,000	366,633,669,000	-	366,633,669,000	100.0000%
16	BALAI BESAR PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU JEPARA	11,579,998,000	5,728,781,000	5,851,217,000	-	5,851,217,000	100.0000%
	TOTAL	768,646,543,000	294,601,192,459	474,070,870,541	-	474,070,870,541	100.00%

 Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI BESAR RISET PENGOLAHAN PRODUK DAN BIOTEKNOLOGI KELAUTAN DAN PERIKANAN	6,852,355,000	3,602,011,000	3,250,344,000	0	3,250,344,000	100.00%
2	BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,734,269,000	766,079,000	968,190,000	0	968,190,000	100.00%
3	BALAI RISET PERIKANAN LAUT	1,380,044,000	510,142,000	869,902,000	0	869,902,000	100.00%
4	BALAI RISET PEMULIHAN SUMBER DAYA IKAN	2,713,372,000	945,404,000	1,767,968,000	0	1,767,968,000	100.00%
5	BALAI RISET PEMULIAAN IKAN	5,195,890,000	2,077,925,000	3,117,965,000	0	3,117,965,000	100.00%
6	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR TAWAR DAN PENYULUHAN PERIKANAN	6,884,926,000	2,455,714,000	4,429,212,000	0	4,429,212,000	100.00%
7	BALAI RISET BUDIDAYA IKAN HIAS	5,027,470,000	2,990,213,000	2,037,257,000	0	2,037,257,000	100.00%
8	LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR	3,699,357,000	1,360,567,000	2,338,790,000	0	2,338,790,000	100.00%
9	BALAI RISET PERIKANAN PERAIRAN UMUM DAN PENYULUHAN PERIKANAN	8,172,722,000	2,874,033,000	5,298,689,000	0	5,298,689,000	100.00%
10	BALAI RISET PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN PENYULUHAN PERIKANAN	12,977,451,000	7,284,745,000	5,692,706,000	0	5,692,706,000	100.00%
11	LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN	3,090,000,000	1,666,257,000	1,423,743,000	0	1,423,743,000	100.00%
12	BALAI BESAR RISET BUDIDAYA LAUT DAN PENYULUHAN PERIKANAN	5,871,421,000	3,366,137,000	2,505,284,000	0	2,505,284,000	100.00%
13	LOKA RISET PERIKANAN TUNA	10,351,733,000	8,974,145,000	1,377,588,000	0	1,377,588,000	100.00%
14	Pusat Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	15,645,586,000	7,968,044,000	7,677,542,000	0	7,677,542,000	100.00%
15	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SUKAMANDI	5,353,114,000	3,899,339,000	1,453,775,000	0	1,453,775,000	100.00%
16	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI	12,180,958,000	10,520,456,000	1,660,502,000	0	1,660,502,000	100.00%
17	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN MEDAN	11,198,948,000	9,407,506,000	1,791,442,000	0	1,791,442,000	100.00%
18	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BITUNG	4,894,433,000	3,558,327,000	1,336,106,000	0	1,336,106,000	100.00%
19	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN AMBON	6,430,703,000	5,176,541,000	1,254,162,000	0	1,254,162,000	100.00%
20	POLITEKNIK AHLI USAHA PERIKANAN	27,934,979,000	13,535,768,000	14,399,211,000	0	14,399,211,000	100.00%
21	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SIDOARJO	17,719,192,000	8,500,585,000	9,218,607,000	0	9,218,607,000	100.00%
22	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG	6,417,426,000	5,522,634,000	894,792,000	0	894,792,000	100.00%
23	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG	5,483,764,000	3,178,854,000	2,304,910,000	0	2,304,910,000	100.00%
24	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KARAWANG	31,989,836,000	3,614,574,356	28,375,261,644	0	28,375,261,644	100.00%
25	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN KUPANG	6,682,838,000	4,489,408,476	2,193,429,524	0	2,193,429,524	100.00%
26	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE	9,773,786,000	6,837,572,000	2,936,214,000	0	2,936,214,000	100.00%
27	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN JEMBRANA	1,706,542,000	546,606,000	1,159,936,000	0	1,159,936,000	100.00%
28	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN PANGANDARAN	1,581,387,000	567,902,000	1,013,485,000	0	1,013,485,000	100.00%
29	POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN DUMAI	4,037,436,000	2,328,361,000	1,669,707,000	0	1,669,707,000	100.00%
30	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH TEGAL	4,422,804,000	3,318,442,000	1,104,362,000	0	1,104,362,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH LADONG	4,834,550,000	2,324,153,000	2,510,397,000	0	2,510,397,000	100.00%
32	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PARIAMAN	4,749,473,000	2,935,453,000	1,814,020,000	0	1,814,020,000	100.00%
33	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH KOTA AGUNG LAMPUNG	4,516,869,000	3,401,264,000	1,115,605,000	0	1,115,605,000	100.00%
34	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH PONTIANAK	1,224,694,000	602,519,000	622,175,000	0	622,175,000	100.00%
35	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH WAEHERU	3,963,035,000	2,414,682,000	1,548,353,000	0	1,548,353,000	100.00%
36	SEKOLAH USAHA PERIKANAN MENENGAH SORONG	1,722,184,000	1,132,576,000	589,608,000	0	589,608,000	100.00%
37	LOKA RISET MEKANISASI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	1,776,770,000	780,782,000	995,988,000	0	995,988,000	100.00%
38	LOKA RISET BUDIDAYA RUMPUT LAUT	2,457,443,000	1,990,062,000	482,887,000	0	482,887,000	100.00%
39	SEKRETARIAT BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDMPK	37,408,305,000	21,099,518,000	16,308,787,000	0	16,308,787,000	100.00%
40	BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN TEGAL	21,424,278,000	13,277,404,000	8,146,874,000	0	8,146,874,000	100.00%
41	AKADEMI KOMUNITAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,793,500,000	2,050,631,000	1,742,869,000	0	1,742,869,000	100.00%
	TOTAL	340,775,885,000	186,450,572,832	154,301,450,168	-	154,301,450,168	100.00%

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP JAKARTA	18,936,169,000	11,650,004,000	7,286,165,000	0	7,286,165,000	100.00%
2	STASIUN PENGAWASAN SDKP BELAWAN	16,984,790,000	11,649,012,000	5,385,164,000	0	5,385,164,000	100.00%
3	STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK	19,957,494,000	11,785,669,000	8,171,825,000	0	8,171,825,000	100.00%
4	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP TUAL	24,383,171,000	10,392,543,000	13,990,628,000	0	13,990,628,000	100.00%
5	STASIUN PENGAWASAN SDKP CILACAP	8,828,253,000	4,830,075,000	3,998,178,000	0	3,998,178,000	100.00%
6	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP LAMPULO	22,623,261,000	16,093,548,000	6,529,713,000	0	6,529,713,000	100.00%
7	STASIUN PENGAWASAN SDKP TAHUNA	8,571,856,000	4,963,934,000	3,607,922,000	0	3,607,922,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
8	STASIUN PENGAWASAN SDKP AMBON	10,673,580,000	6,260,613,000	4,412,967,000	0	4,412,967,000	100.00%
9	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BENOA	18,995,926,000	13,172,220,000	5,823,706,000	0	5,823,706,000	100.00%
10	STASIUN PENGAWASAN SDKP KUPANG	11,368,638,000	8,336,319,000	3,032,319,000	0	3,032,319,000	100.00%
11	STASIUN PENGAWASAN SDKP BIAK	10,548,291,000	6,522,652,000	4,025,639,000	0	4,025,639,000	100.00%
12	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM	21,481,831,000	12,683,680,000	8,798,151,000	0	8,798,151,000	100.00%
13	STASIUN PENGAWASAN SDKP TARAKAN	8,394,285,000	5,146,180,000	3,248,105,000	0	3,248,105,000	100.00%
14	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP	291,951,995,000	216,367,404,000	75,584,591,000	0	75,584,591,000	100.00%
15	PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG	24,072,394,000	16,304,328,000	7,768,066,000	117,745,000	7,885,811,000	101.52%
TOTAL		517,771,934,000	356,158,181,000	161,663,139,000	117,745,000	161,780,884,000	100.07%

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	6,552,158,000	2,941,461,000	3,610,697,000	0	3,610,697,000	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	65,696,049,000	5,508,508,000	60,187,541,000	0	60,187,541,000	100.00%
3	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	6,403,317,000	3,276,664,000	3,126,653,000	0	3,126,653,000	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	4,920,264,000	3,099,917,000	1,820,347,000	0	1,820,347,000	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	3,715,487,000	703,996,000	3,011,491,000	0	3,011,491,000	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	3,094,308,000	1,357,979,000	1,736,329,000	0	1,736,329,000	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	3,609,688,000	1,986,038,000	1,623,650,000	0	1,623,650,000	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	61,532,560,000	3,463,651,000	58,068,909,000	0	58,068,909,000	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	2,976,153,000	1,558,921,000	1,417,232,000	0	1,417,232,000	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	6,497,602,000	3,301,931,000	3,195,671,000	0	3,195,671,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWANDANG	3,817,270,000	1,582,763,000	2,234,507,000	0	2,234,507,000	100.00%
12	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	301,142,412,000	81,549,421,000	219,592,991,000	0	219,592,991,000	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	6,367,671,000	3,959,325,000	2,408,346,000	0	2,408,346,000	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	260,214,908,000	3,727,756,000	256,487,152,000	0	256,487,152,000	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	5,691,813,000	2,885,497,000	2,806,316,000	0	2,806,316,000	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	40,131,847,000	5,582,775,000	34,549,072,000	0	34,549,072,000	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	4,741,886,000	3,397,358,000	1,344,528,000	0	1,344,528,000	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIAT	5,016,456,000	3,801,293,000	1,215,163,000	0	1,215,163,000	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	8,285,054,000	1,787,024,000	6,498,030,000	0	6,498,030,000	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	4,080,248,000	2,147,780,000	1,932,468,000	0	1,932,468,000	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	6,263,656,000	2,516,166,200	3,747,489,800	0	3,747,489,800	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	5,351,273,000	2,473,815,000	2,877,458,000	1,125,582,000	4,003,040,000	139.12%
23	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	5,110,199,000	2,895,155,112	2,215,043,888	(116,240,888)	2,098,803,000	94.75%
24	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	30,796,027,000	18,028,494,000	12,767,533,000	(2,609,427,000)	10,158,106,000	79.56%
	TOTAL	852,008,306,000	163,533,688,312	688,474,617,688	(1,600,085,888)	686,874,531,800	99.77%

✚ Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
1	BALAI KIPMHKP SURABAYA I	7,333,862,000	2,731,893,000	4,601,969,000	0	4,601,969,000	100.00%
2	BALAI KIPMHKP MEDAN I	3,610,142,000	1,382,357,000	2,227,785,000	0	2,227,785,000	100.00%
3	BALAI BESAR KIPMHKP MAKASSAR	4,273,547,000	2,159,240,000	2,114,307,000	0	2,114,307,000	100.00%
4	BALAI KIPMHKP DENPASAR	2,823,538,000	1,039,528,000	1,784,010,000	0	1,784,010,000	100.00%
5	STASIUN KIPMHKP BATAM	2,247,622,000	896,360,302	1,351,261,698	0	1,351,261,698	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
6	STASIUN KIPMHKP PADANG	1,695,668,000	951,373,000	744,295,000	0	744,295,000	100.00%
7	STASIUN KIPMHKP PALEMBANG	1,536,305,000	848,465,000	687,840,000	0	687,840,000	100.00%
8	STASIUN KIPMHKP PONTIANAK	2,858,459,000	1,368,402,000	1,490,057,000	0	1,490,057,000	100.00%
9	BALAI KIPMHKP BALIKPAPAN	1,110,080,000	669,643,000	440,437,000	0	440,437,000	100.00%
10	BALAI KIPMHKP MANADO	3,933,678,000	2,221,985,000	1,711,693,000	0	1,711,693,000	100.00%
11	STASIUN KIPMHKP KENDARI	656,543,000	305,302,000	351,241,000	0	351,241,000	100.00%
12	BALAI KIPMHKP MATARAM	1,734,377,000	651,863,000	1,082,514,000	0	1,082,514,000	100.00%
13	BALAI KIPMHKP JAYAPURA	1,550,045,000	1,150,895,000	399,150,000	0	399,150,000	100.00%
14	STASIUN KIPMHKP MAMUJU	103,423,000	68,423,000	35,000,000	0	35,000,000	100.00%
15	STASIUN KIPMHKP KUPANG	989,490,000	930,680,000	58,810,000	0	58,810,000	100.00%
16	STASIUN KIPMHKP ACEH	1,914,801,000	879,607,000	1,035,194,000	0	1,035,194,000	100.00%
17	BALAI KIPMHKP BANJARMASIN	1,493,827,000	928,664,000	565,163,000	0	565,163,000	100.00%
18	STASIUN KIPMHKP PALU	454,470,000	420,370,000	34,100,000	0	34,100,000	100.00%
19	STASIUN KIPMHKP BENGKULU	1,174,326,000	737,555,000	436,771,000	0	436,771,000	100.00%
20	STASIUN KIPMHKP JAMBI	430,007,000	137,403,100	173,413,900	0	173,413,900	100.00%
21	STASIUN KIPMHKP PALANGKARAYA	1,118,531,000	453,628,000	664,903,000	0	664,903,000	100.00%
22	BALAI KIPMHKP SEMARANG	2,236,942,000	1,046,512,000	1,190,430,000	0	1,190,430,000	100.00%
23	STASIUN KIPMHKP GORONTALO	910,816,000	684,050,000	226,766,000	0	226,766,000	100.00%
24	BALAI KIPMHKP JAKARTA II	2,858,688,000	1,001,469,000	1,857,219,000	0	1,857,219,000	100.00%
25	STASIUN KIPMHKP MERAK	1,654,275,000	995,923,000	658,352,000	0	658,352,000	100.00%
26	STASIUN KIPMHKP PANGKAL PINANG	1,871,554,000	864,822,000	1,006,732,000	0	1,006,732,000	100.00%
27	STASIUN KIPMHKP MERAUKE	1,566,920,000	798,865,000	768,055,000	0	768,055,000	100.00%
28	STASIUN KIPMHKP SORONG	556,662,000	217,925,000	338,737,000	0	338,737,000	100.00%
29	STASIUN KIPMHKP YOGYAKARTA	1,414,763,000	604,480,000	810,283,000	0	810,283,000	100.00%
30	STASIUN KIPMHKP CIREBON	2,929,266,000	1,306,538,000	1,622,728,000	0	1,622,728,000	100.00%

NO	Nama_Satker	KERTAS KERJA KLARIFIKASI (file EXCEL)			REKAP RUP TERUMUMKAN (aplikasi SIRUP)		
		RUP Eksisting	Nilai Identifikasi Efisiensi Belanja	RUP Pasca Revisi	Persentase RUP Terumumkan		
		Pagu Terumumkan		Pagu Terumumkan	Selisih KERTAS KERJA - SIRUP	Pagu Terumumkan	%
31	BALAI KIPMHKP AMBON	1,659,694,000	1,031,308,000	628,386,000	0	628,386,000	100.00%
32	STASIUN KIPMHKP TERNATE	429,629,000	316,664,000	112,965,000	0	112,965,000	100.00%
33	BALAI UJI STANDAR KIPMHKP	6,408,384,000	3,693,415,000	2,714,969,000	0	2,714,969,000	100.00%
34	BALAI KIPMHKP TARAKAN	1,645,435,000	1,490,679,200	154,755,800	0	154,755,800	100.00%
35	STASIUN KIPMHKP PEKANBARU	2,140,551,000	1,748,549,000	392,002,000	0	392,002,000	100.00%
36	BALAI KIPMHKP LAMPUNG	1,470,733,574	525,392,250	945,341,324	0	945,341,324	100.00%
37	SEKRETARIAT BADAN KIPMHKP	44,427,679,000	37,526,741,000	6,900,938,000	397,042,000	7,297,980,000	105.75%
	TOTAL	117,224,732,574	74,786,968,852	42,318,573,722	397,042,000	42,715,615,722	100.94%



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sofiyanto

EKONOMI BIRU UNTUK INDONESIA EMAS



KKP
2025

panganbiru

08
POVERTY GROWTH

BIJAK
MENGELOLA
LAUT

